



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencapaian target pangan dan gizi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ketahanan pangan dan gizi Kota Madiun, perlu disusun pedoman pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- b. bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ditetapkan oleh Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat daerah berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 2

Maksud dari RAD-PG ini yaitu sebagai pedoman dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian gizi bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari RAD-PG ini antara lain:

- a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multi sektor;
- b. meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi, terutama aksi konvergensi penurunan *stunting* daerah;
- c. memberikan pedoman bagi pembangunan pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multi sektor; dan
- d. memberikan pedoman bagi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi pendekatan multi sektor, diarahkan sejalan dengan aksi konvergensi penurunan *stunting*.

Pasal 4

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman untuk pembangunan ketahanan pangan dan pencapaian gizi bagi masyarakat melalui pendekatan multi sektor dan penguatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) RAD-PG disusun dengan mengacu pada RAD-PG Provinsi Jawa Timur.
- (2) Sistematika penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bab I berisi tentang Pendahuluan;
 - b. Bab II berisi tentang Analisis Situasi;
 - c. Bab III berisi tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 - d. Bab IV berisi tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 - e. Bab V berisi tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - f. Bab VI berisi tentang Penutup.

- (3) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pelaporan hasil pemantauan;
 - b. pertemuan; dan/atau
 - c. kunjungan lapangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (5) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan terhadap upaya pencapaian indikator kinerja dalam RAD-PG dan pemenuhan target dalam RAD-PG.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam perbaikan pelaksanaan RAD-PG pada periode berikutnya.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Gubernur Jawa Timur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 28/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI TAHUN 2025-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan dan gizi merupakan faktor yang esensial dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, pangan dan gizi adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pembangunan pangan dan gizi dicapai dengan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*) dan berkelanjutan (*sustainable development*). Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat diharapkan berperan aktif untuk bersama-sama mengatasi permasalahan pangan dan gizi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menekankan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang pemenuhannya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai langkah dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing sehingga mampu untuk hidup sejahtera. Program pembangunan pangan dan gizi menjadi fundamental dalam meningkatkan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin sampai anak usia dua tahun sebagai *golden age* masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang optimal.

Pemerintah pusat dan daerah utamanya memainkan peran krusial dengan mengimplementasikan beragam kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, memperbaiki akses terhadap makanan yang bergizi, serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya pola makan sehat. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah dengan memperkuat pertanian lokal (*urban farming* di Kota Madiun) melalui dukungan teknis dan finansial kepada masyarakat, dan fasilitasi akses pasar bagi produk pertanian bernilai tambah tinggi. Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan program bantuan pangan subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga memastikan bahwa semua warga memiliki akses terhadap pangan yang memadai.

Pendidikan gizi juga menjadi fokus penting, dengan mengadakan kampanye dan program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang seimbang dan pola makan dan pola hidup yang sehat. Selain itu, pemerintah daerah juga mengawasi keamanan pangan dengan mengatur praktik produksi pangan segar yang sehat, pengolahan makanan yang menjaga kebersihan serta melakukan pengujian dan pengendalian kualitas secara berkala melalui Perangkat Daerah terkait.

Kolaborasi pihak swasta, organisasi non pemerintah, dan lembaga internasional, pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan program-programnya dan memperoleh sumber daya tambahan untuk mengatasi masalah pangan dan gizi secara lebih efektif dan komprehensif. Terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas dari program-program yang telah dilaksanakan, serta untuk menyesuaikan strategi ke depannya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat secara proaktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pangan dan gizi yang berkualitas.

Komitmen pemerintah dalam mendukung investasi pengembangan pangan dan gizi melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Lebih jauh ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah. Rencana Aksi Pangan dan Gizi menjadi pedoman operasional yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi sebagai langkah akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Rencana Aksi Pangan dan Gizi diintegrasikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG`s), khususnya tujuan nomor 2 (*zero hunger*) ditujukan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan. Implementasi pengembangan pangan dan gizi ini juga mendukung pencapaian tujuan lainnya seperti kesehatan (tujuan 3), pendidikan berkualitas (tujuan 4), kesetaraan gender (tujuan 5), dan penanganan perubahan iklim (tujuan 13), mengingat semua aspek tersebut saling terkait dengan isu pangan dan gizi.

Selain ketahanan pangan, pembangunan pangan dan gizi juga menekankan pada pentingnya pewujudan kedaulatan pangan (*food sovereignty*), kemandirian pangan (*food resilience*), dan keamanan pangan (*food safety*). Indikator pencapaian ketahanan pangan dapat dilihat melalui tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Artinya, ketahanan pangan dapat dicapai melalui ketersediaan pangan yang cukup dari segi kuantitas maupun kualitas, bergizi, beragam, bermutu, aman, merata, dan terjangkau, sehingga masyarakat memiliki hidup yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Selain itu aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh, kualitas pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Permasalahan gizi juga erat kaitannya dengan pendidikan, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, budaya, agama, dan perlindungan anak. Sehingga, Rencana Aksi Pangan dan Gizi sangat terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Oleh karena itu, pendekatan sistem terintegrasi (multi sektor) dalam program pembangunan pangan dan gizi menjadi kunci yang ditujukan untuk menyelaraskan partisipasi seluruh *stakeholders* mencakup Perangkat Daerah dan instansi pemerintahan daerah. Partisipasi dan koordinasi lintas sektor yang bersinergi menjadi penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang lebih efektif. Partisipasi seluruh *stakeholders* terkait menjadi perlu dikoordinasikan dan disinkronisasikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi secara efektif baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi, kabupaten/kota).

Input dalam pembangunan gizi ditinjau dari aspek pemerataan akses pangan dan utilitas pangan yang aman dan bergizi melalui program terintegrasi. Tingginya akses pangan tentu didorong oleh kapasitas daya beli masyarakat, sementara aspek utilitas pangan terkait erat dengan pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi yang sekaligus menjadi komponen utama peningkatan status gizi di masyarakat.

Indikator output Rencana Aksi Pangan dan Gizi dilihat melalui aspek kesehatan yang tidak terlepas dari dukungan *stakeholder* yang terlibat dan masyarakat. Sejalan dengan motto SDGs, yakni *No One Left Behind*, yang artinya tidak ada satupun yang tertinggal dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Berbagai sektor saling bersinergi dalam program dan pelaksanaannya.

Pembangunan pangan dan gizi dimulai sejak tahun 2001 dengan melalui program-program pembangunan ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan pangan dan gizi saat ini sebagai langkah penerus dampak positif pembangunan pangan dan gizi yang telah dilakukan berbasis pendekatan multi sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018, untuk mendukung pembangunan pangan dan gizi di lingkup nasional dan provinsi, maka disusunlah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Madiun. Pembentukan dan pelaksanaan RAD-PG Kota Madiun ini menunjukkan komitmen Kota Madiun untuk menyelesaikan masalah global dengan solusi lokal yang berkelanjutan, khususnya dalam hal pangan dan gizi yang mengacu pada RAD-PG Provinsi Jawa Timur.

RAD-PG Kota Madiun disusun dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat melalui serangkaian strategi dan kegiatan yang terkoordinasi. Sasaran dari rencana aksi ini meliputi peningkatan aksesibilitas pangan yang aman, bergizi, dan beragam untuk semua lapisan masyarakat; penurunan prevalensi *stunting* dan penyakit terkait gizi lainnya; serta pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta dalam produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan.

RAD-PG Kota Madiun mengadopsi pendekatan multi sektor dan multi-aktor yang melibatkan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi sehingga, terdapat *stakeholders* terkait dengan keterlibatan secara langsung dan tidak langsung dalam rangka pembangunan pangan dan gizi. Oleh karena itu, keterlibatan instansi-instansi yang berkaitan dengan intervensi langsung maupun tidak langsung perlu dikoordinasikan mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi secara lebih efektif dalam mensinergikan program kerjanya guna mendukung perbaikan pangan dan gizi di Kota Madiun.

1.2 Kedudukan RAD-PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

RAD-PG memiliki peran yang strategis dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah seperti pada Gambar 1. RAD-PG berada pada posisi sentral, membentuk landasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan pembangunan. Berikut adalah beberapa aspek yang menyoroti kedudukan RAD-PG dalam konteks kebijakan pembangunan daerah:

1. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

RAD-PG menjadi instrumen penting dalam memajukan sektor pertanian dan pangan lokal dengan merinci langkah-langkah aksi untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan lokal. RAD-PG memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Kesehatan Masyarakat

Sebagai bagian integral dan kebijakan pembangunan daerah, RAD-PG memberikan perhatian khusus pada aspek kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan gizi dan mengurangi masalah gizi buruk di daerah menjadi fokus utama, yang secara langsung mendukung peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

3. Peningkatan Ketahanan Pangan

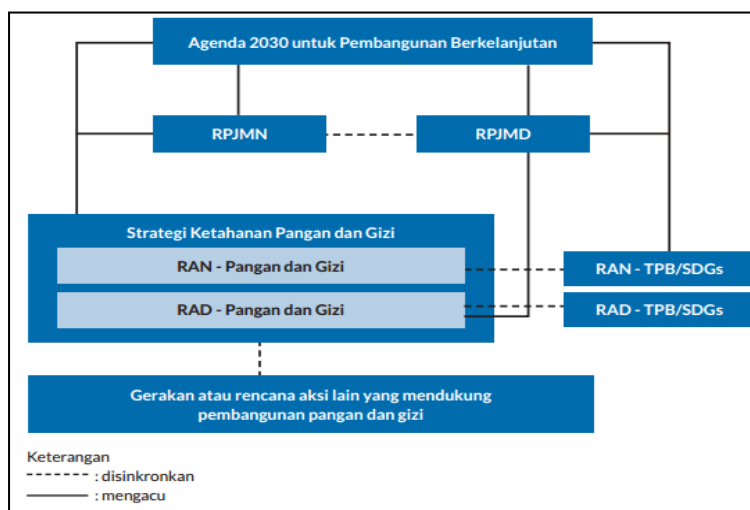
RAD-PG merancang langkah-langkah konkret untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan utama. RAD-PG memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan perubahan ekonomi.

4. Kolaborasi Lintas Sektor

Konteks kebijakan pembangunan daerah, RAD-PG mendorong kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintahan, sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil. RAD-PG menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan dengan cara yang holistik dan berkelanjutan.

5. Peningkatan Kualitas Hidup

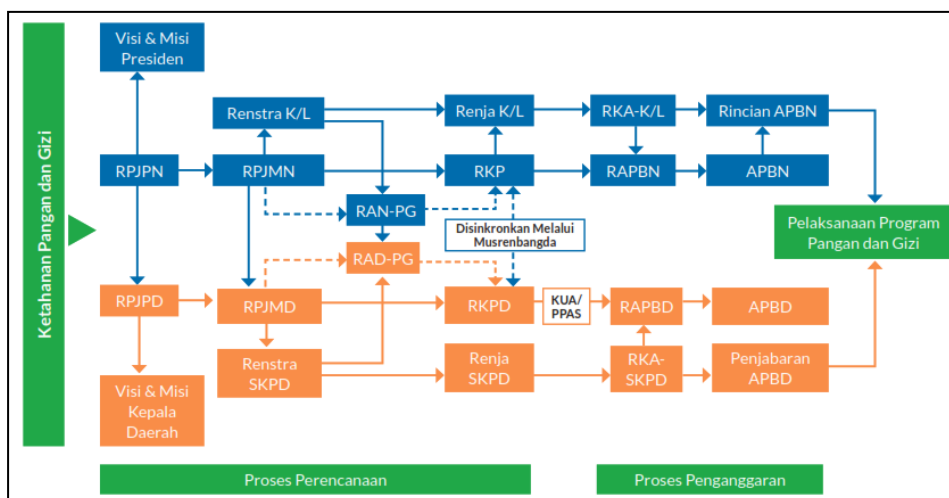
RAD-PG bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui upaya peningkatan aksesibilitas pangan dan peningkatan kesadaran gizi. RAD-PG berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif.



Gambar 1. Kedudukan RAD-PG dan RAN-PG dalam Perencanaan Pembangunan

Sumber: Dimodifikasi dari Bappenas, 2020

Rencana Aksi Pangan dan Gizi telah dikembangkan dengan mempertimbangkan determinan dan permasalahan multi sektoral di berbagai level. RAD-PG akan disusun oleh pemerintah daerah yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dengan menggunakan pendekatan yang sama seperti pada Gambar 2, yaitu aksi penajaman terhadap kegiatan yang sudah ada serta mengisi *gap* yang belum terfasilitasi ke dalam dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya.



Gambar 2. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan
Sumber: Dimodifikasi dari Bappenas, 2020

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akedemisi (perguruan tinggi/organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi.

Rencana Aksi Pangan dan Gizi di pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dapat menjadi pedoman operasional yang berisi rekomendasi kegiatan bidang pangan dan gizi melalui koordinasi lintas sektor. Rekomendasi kegiatan yang dimaksud berisi penajaman aksi (baru) yang tidak hanya mengkompilasi program/kegiatan yang sudah ada pada dokumen perencanaan sebelumnya, dimaksudkan untuk mengisi *gap* mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD.

RAD-PG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen daerah dalam melakukan koordinasi multi sektor di bidang pangan dan gizi, juga merefleksikan komitmen pemerintah daerah sebagai upaya mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan status gizi di daerah masing-masing. Penyusunan RAD-PG memerlukan keterlibatan berbagai Perangkat Daerah terkait. Penyusunan akan diawali dengan pembentukan forum koordinasi yaitu forum pengarah dan forum teknis.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam menyusun RAD-PG dapat diselaraskan pelaksanaan kegiatannya terhadap aksi konvergensi penurunan *stunting* sehingga pemerintah daerah tidak perlu menyusun rencana aksi daerah khusus untuk penurunan *stunting* hingga terbit peraturan perundang-undangan yang sah yang mengatur tentang RAD penurunan *stunting*.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RAD-PG adalah memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Madiun dalam pelaksanaan operasional program dan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, terutama aksi konvergensi penurunan *stunting* di daerah. Selanjutnya penyusunan RAD-PG serta pemantauan dan evaluasinya diarahkan sejalan dengan aksi konvergensi penurunan *stunting* dan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat Kota Madiun.

Penyusunan RAD-PG Kota Madiun secara rinci bertujuan untuk:

1. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multi sektor;
2. meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi, terutama aksi konvergensi penurunan *stunting* di daerah;
3. memberikan panduan bagi pembangunan pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multi sektor; dan
4. memberikan panduan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi pendekatan multi sektor, diarahkan sejalan dengan aksi konvergensi penurunan *stunting*.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

Dasar hukum yang menjadi landasan disusunnya dokumen RAD-PG adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

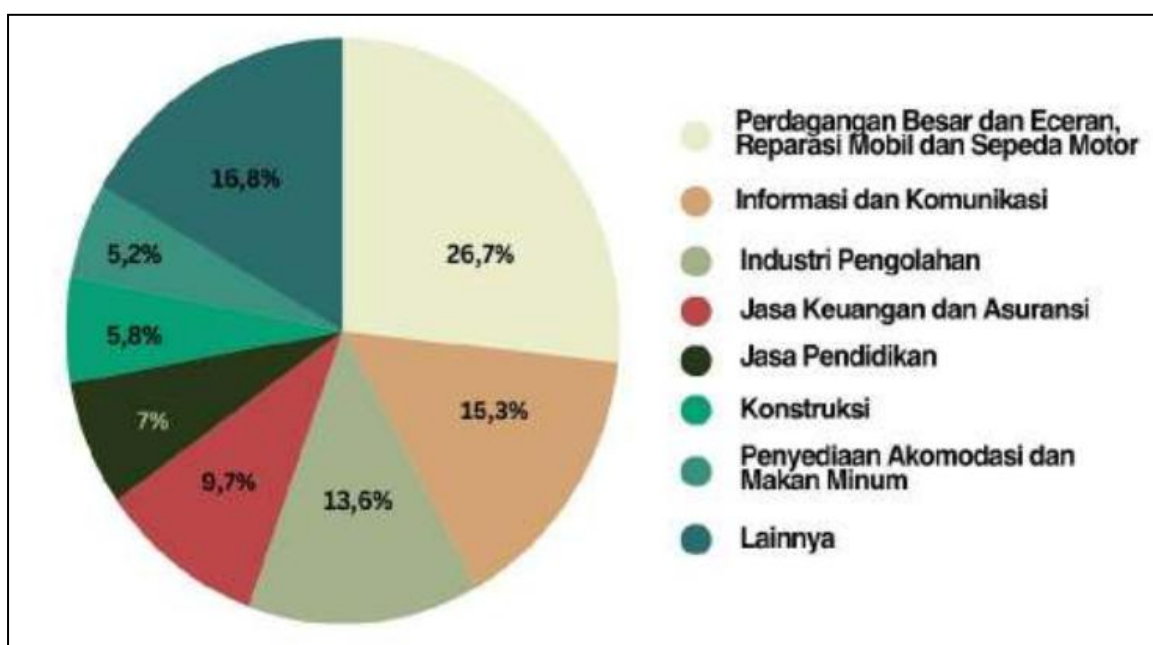
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

BAB II ANALISIS SITUASI

2.1 Situasi Sosial Ekonomi di Kota Madiun

2.2.1 Gambaran Umum Perekonomian di Kota Madiun

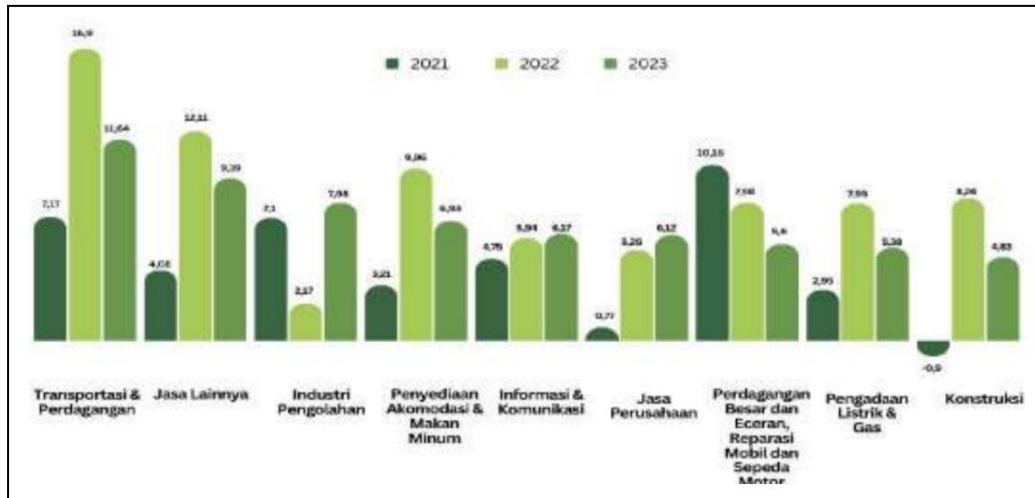
Perekonomian di Kota Madiun, dilihat dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa dominasi struktur ekonomi ada pada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (26,7%), informasi dan komunikasi (15,3%) dan industri pengolahan (13,6%). Struktur ekonomi di Kota Madiun sangat kecil kontribusi pertaniannya. Hal ini memang kharakter umum dari wilayah kota.



Gambar 3. Struktur PDRB Kota Madiun menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun Tahun 2023
Sumber: BPS (2023)

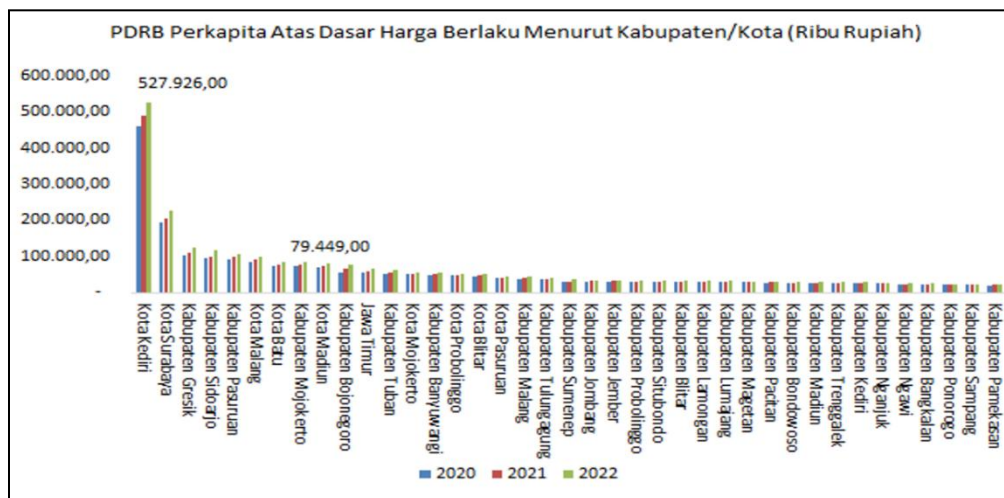
Dinamika struktur ekonomi di Kota Madiun juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan di bidang transportasi dan perdagangan, kemudian disusul perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta jasa lainnya seperti yang tertera pada Gambar 4.

Pertumbuhan ini menunjukkan pula dominasi sektor non pertanian yang sangat besar di dalam menopang ekonomi Kota Madiun. Struktur ekonomi kota Madiun tahun 2023, dari sisi produksi didominasi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 26,71%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 73,19% (BPS, 2023).



Gambar 4. Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun Tahun 2021-2023
Sumber: BPS (2023)

Income per kapita di Kota Madiun juga termasuk dalam kategori yang tinggi. Kota Madiun menempati urutan ke-9 tertinggi dalam *income* per kapita di Jawa Timur sesuai dengan yang ada pada Gambar 5.



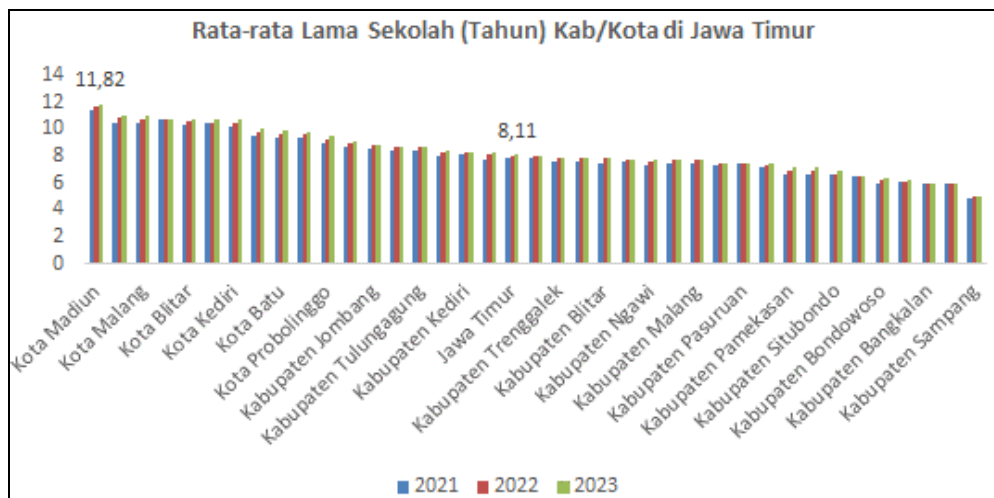
Gambar 5. *Income* per kapita Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Sumber: BPS (2023)

Kondisi lainnya, dari tingginya *income* per kapita juga masih menyisakan permasalahan mendasar, yaitu permasalahan kemiskinan. Kota Madiun dari tingkat kemiskinan ada pada peringkat ke-4 terendah di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan 4,76% dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,3%. Angka kemiskinan di Kota Madiun sempat meningkat tahun 2021 menjadi 5,09 dan kemudian turun tajam tahun 2022 (4,76%). Selain kemiskinan, permasalahan lainnya adalah pengangguran. Total penduduk usia kerja sebanyak 144,820 penduduk, tidak termasuk tingkat kerja ada 48,005 penduduk, dan 98,815 penduduk angkatan kerja. Melalui penduduk angkatan kerja, terdapat 6,188 penduduk yang masuk kategori pengangguran. Hal ini menjadi permasalahan yang terus diupayakan penanganannya lintas sektor dalam rangka menangani kemiskinan dan pengangguran, utamanya menjadi tupoksi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Kemiskinan dan pengangguran merupakan kelompok masyarakat yang rentan atas akses pangan karena rendahnya daya beli. Karena kondisi ini peran pemerintah daerah dalam mengawal ketersediaan pangan dan akses pangan untuk setiap individu sangat penting. Pemberian bantuan pangan dan *design* kebijakan lainnya terkait masyarakat rentan akses pangannya penting untuk terus dilakukan.

2.2.2 Pendidikan di Kota Madiun

Faktor yang dominan memberikan penilaian sangat baik dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun adalah tingkat pendidikan di Kota Madiun. Lama pendidikan di Kota Madiun sangat tinggi bahkan tertinggi di Provinsi Jawa Timur dengan nilai 11,82 tahun seperti yang tertera pada Gambar 6. Nilai ini lebih tinggi dari Kota Malang yang rerata lama sekolahnya adalah 10,69.

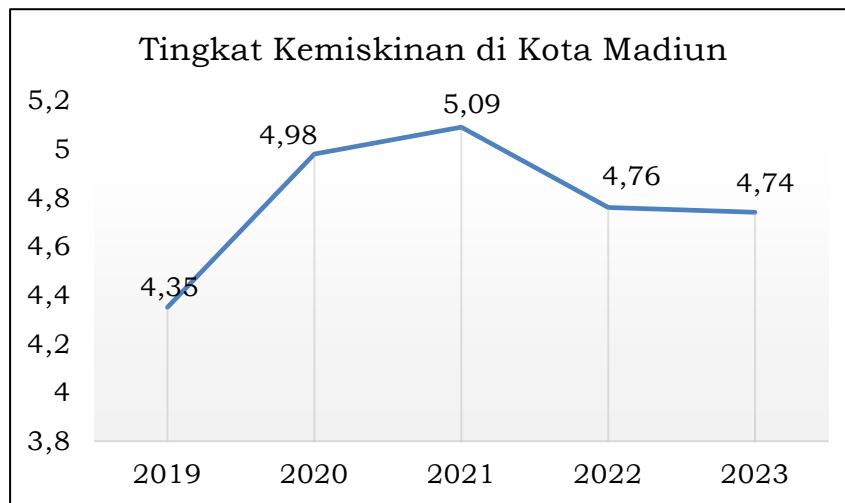


Gambar 6. Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Sumber: BPS (2023)

2.2.3 Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Madiun

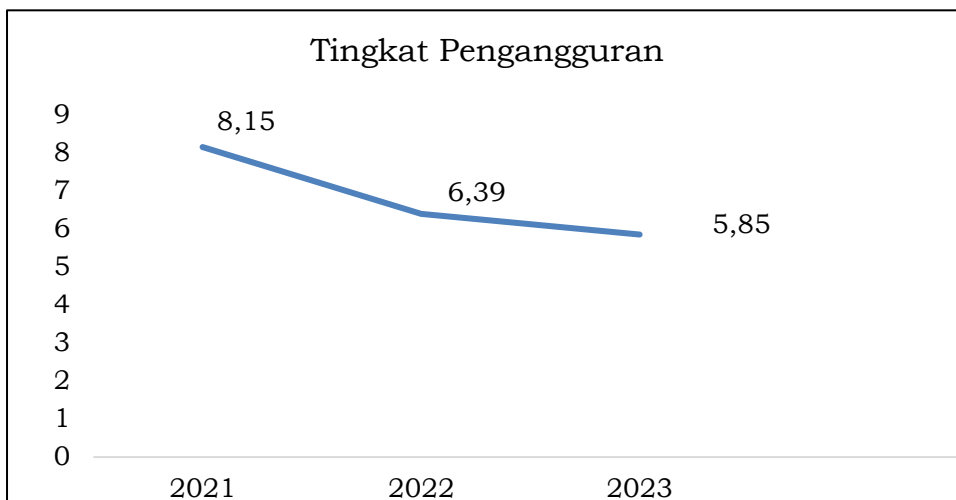
Persoalan kemiskinan merupakan masalah pokok dari proses pembangunan ekonomi. Masalah kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh pemerintah pusat akan tetapi juga menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah daerah. Persoalan kemiskinan yang dihadapi pemerintah berkaitan erat dengan rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Rendahnya pendapatan yang diperoleh berimbas pada kurangnya kesempatan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas pemerintah lainnya. Begitu pula dengan pendapatan daerah yang rendah menyebabkan kurang terdistribusinya pemerataan pendapatan bagi masyarakat.

Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun terus mengalami penurunan. Berdasarkan survei sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7, diketahui bahwa saat ini angka kemiskinan di Kota Madiun berada pada Persentase 4,74%. Angka ini turun 0,02% atau sebanyak 30 jiwa dari tahun sebelumnya. Artinya, saat ini masih ada 8.460 jiwa yang termasuk kategori miskin. Walaupun tingkat jumlah penduduk miskin digolongkan terus mengalami penurunan, garis kemiskinan di Kota Madiun justru mengalami peningkatan. Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Garis kemiskinan di Kota Madiun di tahun 2023 berada pada angka Rp605.131 per kapita per bulan. Hal ini mendeskripsikan bahwa individu dengan pendapatan per bulan di bawah angka tersebut otomatis masuk kategori miskin. Sedangkan, pada tahun 2022, garis kemiskinan Kota Madiun berada di angka Rp551.620.



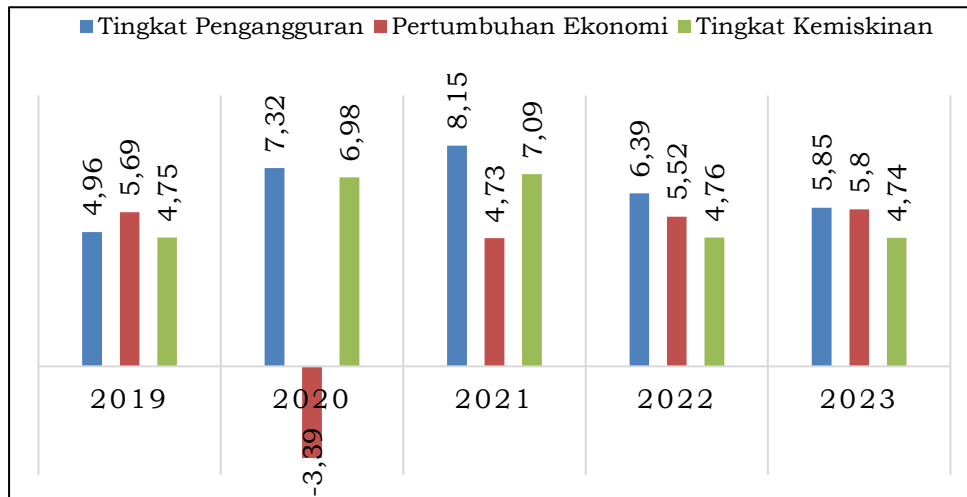
Gambar 7. Tingkat Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber: BPS (2024)

Pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kemajuan masyarakat. Pencapaian kemajuan ini membutuhkan kesempatan kerja masyarakat yang pada akhirnya mengarah pada pemerataan pendapatan di antara penduduk, dan membuat banyak perubahan untuk mendukung pembangunan negara dan keajaiban ekonomi tinggi. Sedangkan di sisi lain, tentunya terdapat kesenjangan antara kesempatan kerja dengan angkatan kerja yang kurang seimbang, sehingga dengan semakin minimnya kesempatan kerja dan semakin banyaknya pencari kerja akan berdampak buruk terhadap terciptanya pengangguran. Data BPS Kota Madiun menyebutkan bahwa angka pengangguran di Kota Madiun mengalami tren yang menurun seiring berjalannya waktu. Gambar 8 menjelaskan bahwa angka pengangguran di Kota Madiun pada 2021 tercatat sebesar 8,15%. Sementara pada 2022 turun menjadi 6,39% atau 6.188 orang dan pada tahun 2023 menjadi 5,85% dan dari pengangguran tersebut, berada dalam rentang usia 15-45 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.



Gambar 8. Tingkat Pengangguran di Kota Madiun Tahun 2021-2023
Sumber: BPS (2024)

Pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat wilayah atau daerah. Melalui tujuan utama pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menyusutkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat untuk kemakmurannya.



Gambar 9. Tingkat Pengangguran, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2021-2023
Sumber: BPS (2024)

IPM sebagai tolak ukur kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan yang merupakan dampak dari krisis ekonomi, maka dari itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, IPM dan tingkat kemiskinan yang rendah tidak membenarkan berkurangnya pengangguran di Kota Madiun. Pengangguran tetap menjadi masalah utama dalam perekonomian karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengangguran dapat menyebabkan masalah yang meluas di Kota Madiun.

2.2 Situasi Pangan di Kota Madiun

2.2.1 Kondisi Ketersediaan Pangan di Kota Madiun

Letak geografis Kota Madiun adalah di bagian barat wilayah Provinsi Jawa Timur, merupakan dataran rendah, terletak antara 7-8⁰ LS atau sepanjang 7,5 km bentang arah utara selatan dan 111-112⁰ BT atau sepanjang 6 km bentang arah barat timur. Letak Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian hingga 67 meter dari permukaan laut.

Kota Madiun merupakan kota transit pada jalur selatan yang menghubungkan kota-kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat seperti Surabaya, Jombang, Madiun, Solo, Yogyakarta sampai DKI Jakarta, sehingga Kota Madiun sangat cocok dan menarik untuk mengembangkan sektor industri, perdagangan, jasa maupun angkutan. Hal ini tampak dari keberadaan sarana dan prasarana di Kota Madiun sehingga dapat melayani kepentingan dalam skala regional dan nasional, seperti pendidikan, kesehatan serta komoditi hasil produksi industri. Salah satu sarana yang mendukung peranan perekonomian dalam skala regional adalah jaringan jalan yang kondisinya sangat baik untuk menghubungkan Kota Madiun, dengan daerah di luar Kota Madiun, yaitu Magetan, Nganjuk, Ponorogo, Jombang, Ngawi, dan Kediri.

Secara administrasi wilayah Kota Madiun berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Madiun dengan batas-batas sebagai berikut:

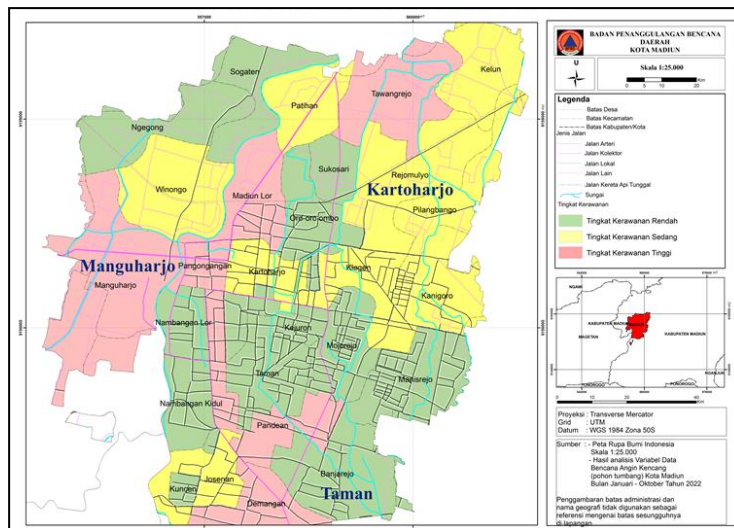
Sebelah Utara : Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun

Sebelah Timur : Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun

Sebelah Selatan : Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

Sebelah Barat : Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun

Luas wilayah Kota Madiun adalah 33,23 km² dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah kecamatan, masing-masing kecamatan terdiri atas 9 (sembilan) kelurahan sesuai dengan Gambar 10.



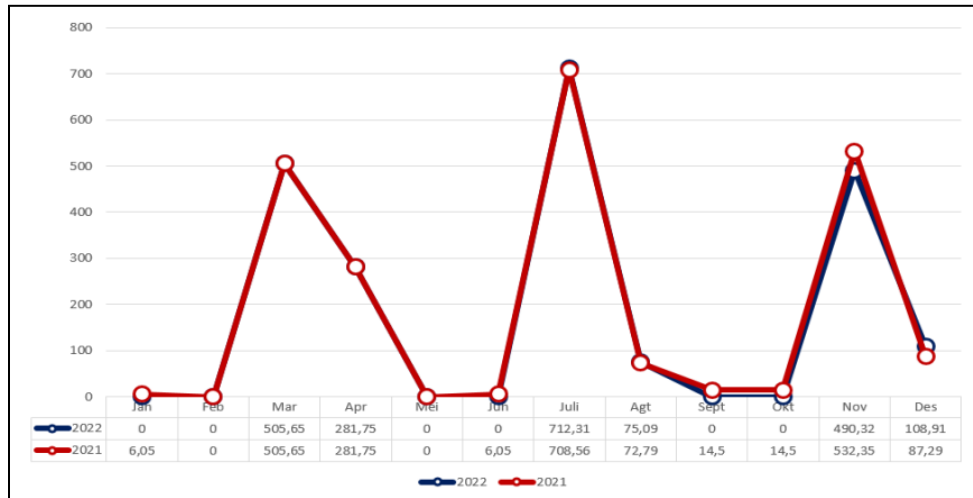
Gambar 10. Peta Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Madiun
Sumber: Madiun Kota (2023)

Wilayah Kota Madiun terletak di lembah Sungai Madiun yaitu sekitar 30 km di sebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dengan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m di atas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0%-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Oleh karenanya, kondisi seperti itu merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.

Struktur geologi Kota Madiun sebagian besar termasuk jenis alluvium sedangkan jenis tanahnya termasuk luvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kota Madiun secara fisik dibagi oleh sungai Madiun yang membujur dari arah utara selatan. Selain itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian. Sumber air yang ada di Kota Madiun, yaitu sumber air dangkal dengan kedalaman sekitar 8 meter dari muka air tanah, sedangkan sumber air artesis terdapat pada kedalaman kurang lebih 90 meter.

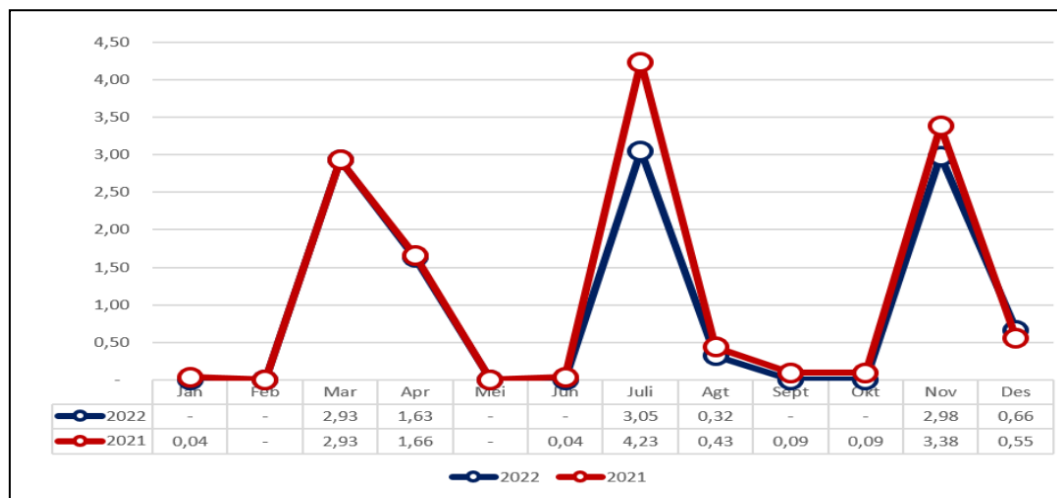
Kota Madiun beriklim tropis dengan temperatur harian rata-rata 24-32° C dan mempunyai curah hujan rata-rata per tahun sekitar 100 hari dan besarnya curah hujan 2.000 mm per tahun. Umumnya, dalam setahun terjadi 4-5 bulan kering dan 2-3 bulan lembah serta 5-6 bulan basah. Arah mata angin di Kota Madiun dari arah selatan ke utara rata-rata 78%. Kota Madiun merupakan daerah *urban* sehingga dominasi penggunaan tanahnya adalah untuk kawasan terdiri dari perumahan dan fasilitas umum.

Berdasarkan aspek ketersediaan pangan di Kota Madiun, yaitu dari sisi produksi dan luas panennya sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 11 dapat diketahui bahwa puncak panen padi pada 2022, yaitu terjadi pada bulan Juli, dengan luas panen mencapai 712,31 hektare. Berikutnya, panen padi pada Maret 2022 lebih rendah dibandingkan panen padi pada Juli 2022 sekitar 505,65 hektare diikuti panen pada November 2022 sebesar 490,32 hektare. Sehingga, total potensi luas panen padi pada 2022 yaitu sebesar 2.174,03 hektare, atau mengalami penurunan sekitar 55,46 hektare (2,49%) dibandingkan luas panen padi pada 2021 yang sebesar 2.229,49 hektare.



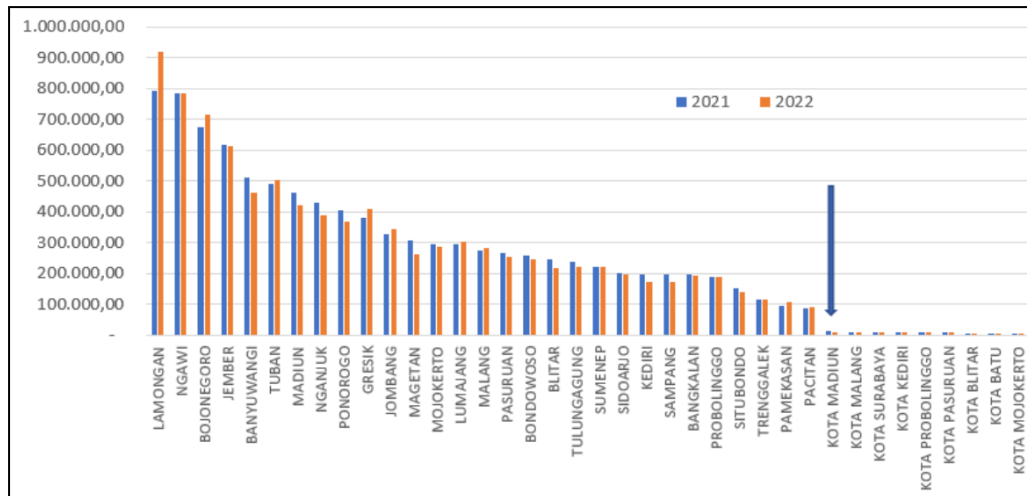
Gambar 11. Perkembangan Luas Panen Padi di Kota Madiun Tahun 2021-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Produksi padi di Kota Madiun sepanjang Januari-September 2022 diperkirakan sebesar 7,94 ribu ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 1,49 ribu ton GKG (15,77%) dibandingkan Januari-September 2021 yang sebesar 9,42 ribu ton GKG sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 12. Sementara itu, berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) padi September 2022, potensi produksi padi sepanjang Oktober-Desember 2022 ialah sebesar 3,65 ribu ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada 2022 adalah sebesar 11,59 ribu ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 1,92 ribu ton GKG (14,22%) dibandingkan 2021 yang sebesar 13,51 ribu ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2021 dan 2022 terjadi di bulan Juli. Sementara produksi padi terendah pada 2022 terjadi di bulan Agustus dan produksi padi terendah pada 2021 terjadi pada bulan Januari dan Juni. Produksi padi pada Juli 2022, yaitu sebesar 3,05 ribu ton GKG, sedangkan produksi padi pada Agustus 2022 sebesar 0,32 ribu ton GKG.



Gambar 12. Perkembangan Produksi Padi di Kota Madiun Tahun 2021-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan total potensi produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) tertinggi pada 2022 adalah Lamongan, Ngawi dan Bojonegoro seperti terlihat pada Gambar 13. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah yaitu Kota Blitar, Kota Batu dan Kota Mojokerto. Adapun Kota Madiun berada pada posisi terendah ke sembilan dari total produksi padi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

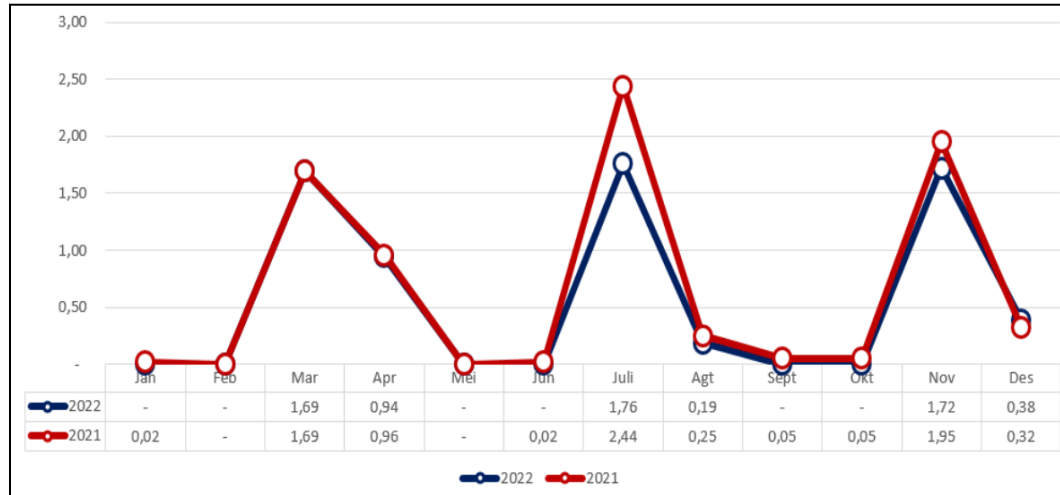


Gambar 13. Posisi Produksi Padi di Kota Madiun di Antara Kabupaten/Kota Lainnya di Jawa Timur
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Peningkatan produksi padi yang cukup besar pada 2022 terjadi di beberapa wilayah sentra produksi padi seperti Lamongan, Pamekasan dan Kota Kediri. Kondisi lain, beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan produksi padi yang cukup besar, misalnya Kota Surabaya, Kota Madiun, dan Magetan.

Produksi padi di Kota Madiun jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari-September 2022 diperkirakan setara dengan 4,58 ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 0,86 ribu ton (15,77%) dibandingkan Januari-September 2021 yang sebesar 5,44 ribu ton. Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober-Desember 2022 ialah sebesar 2,11 ribu ton.

Potensi produksi beras pada 2022 adalah sekitar 6,69 ribu ton, atau mengalami penurunan sebesar 1,11 ribu ton (14,22%) dibandingkan produksi beras pada 2021 yang sebesar 7,77 ribu ton. Produksi beras tertinggi pada 2022 terjadi di bulan Juli, yaitu sebesar 1,76 ribu ton. Sementara itu, produksi beras terendah diperkirakan terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 0,19 ribu ton. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2021, di mana produksi beras tertinggi terjadi pada bulan Juli, namun produksi beras terendah terjadi pada bulan Januari 2021 seperti terlihat pada Gambar 14.

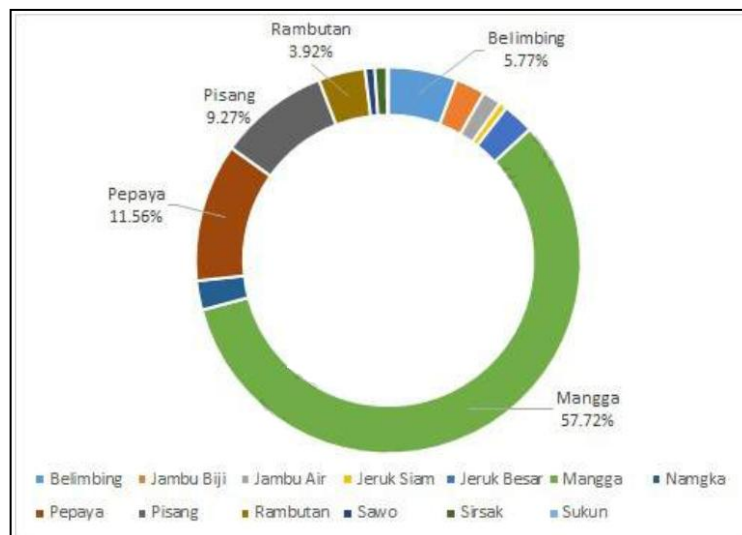


Gambar 14. Perkembangan Produksi Beras di Kota Madiun Tahun 2021-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Kota Madiun sebagaimana kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Timur menunjukkan defisit dari produksi pangan beras domestik. Hal ini memang karakteristik kota cenderung pada aspek industri, perdagangan dan jasa lebih dominan dari sektor pertanian.

Selain komoditas pangan utama beras, Kota Madiun juga memproduksi beberapa komoditas hortikultura utamanya buah-buahan sebagaimana yang disajikan pada Gambar 15. Mangga, pepaya, pisang dan belimbing adalah empat komoditas buah-buahan yang paling banyak dihasilkan oleh Kota Madiun. Mangga sempat mengalami penurunan produksi di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Namun, selama kurun waktu 2019-2022 produksinya terus naik, hingga mencatatkan nilai sebesar 12.677 kuintal (2022) (BPS, 2023).



Gambar 15. Komoditas Buah-Buahan yang Dihasilkan di Kota Madiun

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

2.2.2 Kondisi Akses Pangan di Kota Madiun

Akses pangan bagi masyarakat merupakan kemampuan individu atau keluarga untuk memperoleh makanan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau secara fisik, sosial, dan ekonomi., Akses pangan dalam konteks perkotaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan makanan di pasar lokal, infrastruktur distribusi yang efisien, tingkat pendapatan, harga pangan, dan kebijakan pemerintah terkait pangan.

Tingkat pendapatan yang tinggi memungkinkan untuk meningkatkan akses terhadap pangan, tetapi tidak menjamin keamanan pangan bagi seluruh populasi kota. Sebaliknya, masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh makanan yang cukup dan bergizi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan yang mendukung akses pangan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk program bantuan pangan, pengembangan infrastruktur distribusi pangan, pendidikan gizi, serta promosi pertanian perkotaan dan pasar lokal. Melalui penguatan akses pangan dapat memastikan bahwa masyarakat di Kota Madiun dapat mencapai kesejahteraan dan produktivitas yang optimal.

Akses pangan adalah resultan dari ketersediaan dan kemampuan mendapatkan bahan pangan tersebut. Kemampuan mendapatkan adalah fungsi dari daya beli. Kebutuhan konsumsi dan produksi pangan utama beras di Kota Madiun dan berbagai kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi dan Konsumsi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	KONSUMSI PER KAPITA (KG/TH)*	PRODUKSI BERAS (TON)	PREDIKSI KONSUMSI (TON)*	SURPLUS/DEFISIT (TON)*
Kab. Pacitan	102	50.8cx80	60.375	- 9.495
Kab. Ponorogo	99	233.662	94.817	138.845
Kab. Trenggalek	103	67.244	75.674	- 8.430
Kab. Tulungagung	103	137.378	112.742	24.636
Kab. Blitar	102	142.834	126.052	16.782
Kab. Kediri	104	114.457	170.772	- 56.315
Kab. Malang	106	157.843	282.248	- 124.405
Kab. Lumajang	100	170.383	113.233	57.150
Kab. Jember	104	355.516	265.792	89.724
Kab. Banyuwangi	102	296.500	175.295	121.205
Kab. Bondowoso	108	149.524	84.105	65.419
Kab. Situbondo	108	87.281	74.048	13.233
Kab. Probolinggo	109	109.814	126.552	- 16.738

KABUPATEN/KOTA	KONSUMSI PER KAPITA (KG/TH)*	PRODUKSI BERAS (TON)	PREDIKSI KONSUMSI (TON)*	SURPLUS/DEFISIT (TON)*
Kab. Pasuruan	109	152.988	176.045	- 23.057
Kab. Sidoarjo	115	116.928	241.408	- 124.480
Kab. Mojokerto	107	171.518	120.743	50.775
Kab. Jombang	103	188.716	137.061	51.655
Kab. Nganjuk	103	247.893	114.551	133.342
Kab. Madiun	99	266.652	74.202	192.450
Kab. Magetan	102	177.429	68.489	108.940
Kab. Ngawi	104	454.127	90.401	363.726
Kab. Bojonegoro	104	389.182	135.792	253.390
Kab. Tuban	106	282.600	127.223	155.377
Kab. Lamongan	95	457.699	129.472	328.227
Kab. Gresik	107	219.227	141.465	77.762
Kab. Bangkalan	99	112.784	106.604	6.180
Kab. Sampang	108	112.944	105.473	7.471
Kab. Pamekasan	111	55.850	94.907	- 39.057
Kab. Sumenep	105	128.175	118.181	9.994
Kota Kediri	108	9.570	31.097	- 21.527
Kota Blitar	102	5.506	15.354	- 9.848
Kota Malang	112	3.345	94.321	- 90.976
Kota Probolinggo	106	6.531	25.610	- 19.079
Kota Pasuruan	103	5.153	21.678	- 16.525
Kota Mojokerto	105	4.795	13.966	- 9.171
Kota Madiun	98	2.549	19.242	- 16.693
Kota Surabaya	109	7.799	314.241	- 306.442
Kota Batu	104	5.678	22.408	- 16.730

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan informasi tersebut, maka Kota Madiun harus memiliki kemampuan untuk perdagangan dari luar Kota Madiun sehingga ketersediaan pangan tetap dapat dipenuhi dari impor dari wilayah sekitarnya. Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa Kabupaten Madiun memiliki potensi surplus sekitar 190 ribu ton beras, Kabupaten Magetan memiliki surplus beras sekitar 108 juta ton, dan yang paling besar adalah Kabupaten Ngawi dengan potensi surplus sekitar 363 juta ton beras per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam wilayah administrasi di Provinsi Jawa Timur terjadi potensi perdagangan antar wilayah yang menunjukkan adanya koneksitas antar wilayah dalam pasokan dan distribusi pangannya dalam rangka menjaga ketersediaan pangan di masing-masing wilayah. Maka dari itu, potensi defisit dimiliki wilayah kota terpenuhi dengan baik dari wilayah sekelilingnya.

2.2.3 Kondisi Distribusi Pangan di Kota Madiun

Distribusi pangan di Kota Madiun ditopang oleh fasilitas perdagangan dan pasar yang terkelola dengan baik. Pembinaan perdagangan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun diantaranya adalah pengembangan pasar yang baik untuk dapat diakses masyarakat Kota Madiun.

Salah satu pasar yang dimiliki Kota Madiun adalah Pasar Besar Kota Madiun. Pasar Besar Kota Madiun merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Madiun, terdiri dari empat lantai dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup memadai. Menariknya, pasar ini telah dilengkapi dengan eskalator dan wifi gratis di beberapa sudut areanya sehingga semakin memudahkan pembeli selama berbelanja. Selain itu, adanya kolam renang pada *rooftop*nya juga selalu memikat setiap pembeli yang datang. Luas pasar mencapai 1,67 hektar dengan jumlah unit sebanyak 1.566 unit dan 1.600 pedagang. Aneka ragam jenis barang dagangan adalah daging sapi, daging ayam ras, ayam hidup, ikan laut, palawija, prancangan/kelontong, buah, sayur, kebutuhan pokok, konveksi, sepatu/sandal, pecah belah, kosmetik, perhiasan, elektronik, dan lainnya. Selain pasar besar Kota Madiun juga terdapat Pasar Srijaya yang memiliki luas sekitar 2 hektar yang terdapat sekitar 188 unit lapak penjual. Pasar lainnya yakni Josenan, Spoor, Winongo, Mojorejo, Kojo, Bunga, Manisrejo, Sonokeling, Manguharjo, Logam Jaya, Kawak, Diponegoro, Sleko, dan Gamasoru.

Dinas Perdagangan juga terus membina dan meningkatkan fasilitas pasar dengan melibatkan digitalisasi dalam sistem perdagangan. Selain itu, tanggungjawab atas kelancaran distribusi termasuk dalam kaitannya dengan distribusi pangan ada pada Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting. Beberapa tugas terkait pangan yang dijalankan yaitu:

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Stabilisasi Barang Pokok;
- b. melakukan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern, gudang dan pedagang kaki lima) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang);
- e. melakukan pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas harga barang beredar dan jasa; dan
- f. melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.

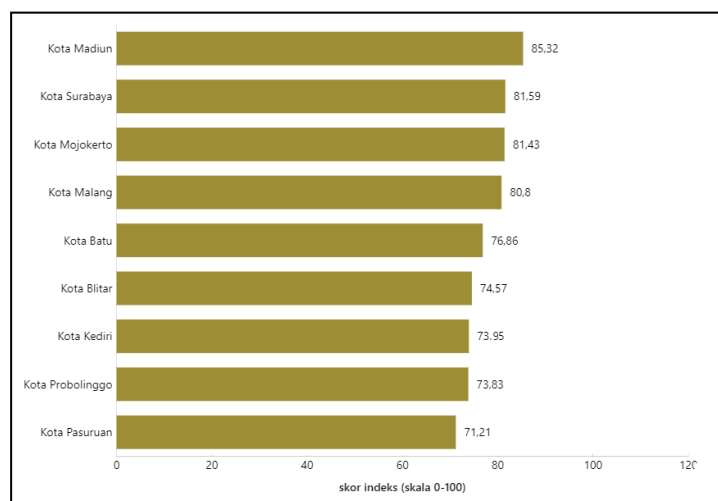
2.2.4 Ketahanan Pangan di Kota Madiun

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengukur indeks ketahanan pangan (IKP) di kota-kota Indonesia berdasarkan delapan indikator utama, yakni:

1. persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
2. persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan >65% terhadap total pengeluaran;
3. persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
4. persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
5. angka harapan hidup pada saat lahir;
6. rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk;
7. rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; dan
8. persentase anak bawah lima tahun (Balita) dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*).

Berbagai indikator itu kemudian diolah menjadi skor berskala 0-100. Semakin tinggi skornya, ketahanan pangan suatu kota diasumsikan semakin baik pula. Dimulai dari tahun 2021 sampai 2023, terjadi peningkatan sangat tajam IKP Kota Madiun. Tahun 2021, IKP Kota Madiun adalah 85,23 lalu meningkat menjadi 92,49 pada tahun 2023. Kota Madiun berada pada peringkat ke 5 nasional di bawah Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kota Salatiga, Kabupaten Badung, Kota Bekasi, Kabupaten Sukoharjo, Kota Solok, dan Kabupaten Tabanan. Sedangkan komparasi antara Kota Madiun dan kota lain di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Capaian Index Ketahanan Pangan di Kota Madiun dan Kota Lain di Jawa Timur Tahun 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Kemampuan Kota Madiun dalam mencapai IKP ditopang oleh bagusnya capaian kinerja dalam perekonomian, pengentasan kemiskinan, penyediaan akses infrastruktur dasar seperti Listrik dan air. Indikator-indikator ini secara rinci dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian IKP Kota Madiun Tahun 2021-2023

INDIKATOR PENGUKURAN, IKP, DAN RANKING	2021	2022	2023
Kemiskinan (%)	4.35	5.09	4.76
Pengeluaran Pangan (%)	9.47	6.49	10.67
Tanpa Listrik (%)	0	0.00	0.00
Tanpa Air Bersih (%)	5.13	6.90	2.04
Lama Sekolah Perempuan (tahun)	10.85	11.79	9.24
Rasio Tenaga Kesehatan	0.02	0.02	21.34
Angka Harapan Hidup (tahun)	72.75	72.83	73.13
Stunting (%)	17.16	12.40	29.90
IKP	85.23	85.32	92.49
IKP Ranking	5	8	5

Sumber: *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) (2021-2023)*

Peran Pemerintah Kota Madiun dalam implementasi Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai bentuk investasi terhadap sumber daya manusia sangat penting untuk dilaksanakan. Kerjasama lintas Perangkat Daerah merupakan kunci kesuksesan program ini. Penganggaran yang optimal dan dukungan DPRD juga menjadi modal besar yang ada di Kota Madiun.

Percepatan pencegahan *stunting* di Kota Madiun menjadi prioritas utama melalui penerapan program Warung Stop *Stunting* (WSS) dengan mekanisme swakelola tipe 4 di tingkat kecamatan. Program ini menyasar perempuan hamil dan Balita yang sangat rentan terhadap *stunting*. Program WSS memerlukan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kader kesehatan, dan masyarakat setempat.

Upaya yang dilakukan antara lain memberikan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarganya tentang pentingnya pola makan seimbang, akses terhadap makanan bergizi, dan kebiasaan makan yang baik bagi anak kecil. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Posyandu Pemberian Makanan Tambahan (PMT), makan bersama di lokasi WSS, bingkisan bahan pangan, dan voucher belanja. Melalui pelaksanaannya, petugas yang ditunjuk memastikan seluruh ibu hamil mendapat perhatian khusus melalui program pemantauan kehamilan secara intensif. Setiap Posyandu minimal terdapat 5 kader kesehatan yang sudah dibekali dengan pengetahuan dasar.

Petugas memberikan informasi tentang pola makan sehat, suplemen nutrisi yang diperlukan, dan pemantauan kesehatan rutin. Hal tersebut antara lain dengan memberikan informasi mengenai ASI eksklusif, pemberian Makanan Pendamping Asi (MPASI) bergizi, serta pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas lingkungan. Melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan masyarakat setempat, program WSS di tingkat kecamatan di Kota Madiun bertujuan untuk mempercepat penurunan angka *stunting*. Program ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan tangguh di masa depan.

Diversifikasi pangan juga merupakan program prioritas yang membantu penyelesaian masalah pangan dan gizi. Kota Madiun mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan bergizi seimbang telah menjadi fokus utama melalui program Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (B2SA). Program ini dilaksanakan dengan pelatihan penyusunan menu dan pengolahan pangan bagi masyarakat. Begitu pula di tingkat kelurahan, dimana sudah banyak terbentuk Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai arena untuk warga berkebun secara komunal.

Sosialisasi konsumsi pangan B2SA dilakukan melalui berbagai kegiatan komunitas, seminar, dan lokakarya yang diselenggarakan di berbagai wilayah Kota Madiun. Baik di kantin sekolah, PKK dan pelaku bisnis pangan. Para peserta dari beragam lapisan masyarakat diberikan informasi mendalam tentang pentingnya makanan yang beragam, kaya akan gizi, seimbang, dan aman dikonsumsi.

Pelatihan penyusunan menu dan pangan olahan segar juga menjadi bagian integral dari program ini. Masyarakat diajak untuk memahami cara menyusun menu sehari-hari yang memenuhi kebutuhan gizi berdasarkan prinsip B2SA. Selain itu, mereka diberikan keterampilan dalam mengolah pangan sehingga dapat memaksimalkan nutrisi yang terkandung di dalamnya.

Para peserta pelatihan diberikan panduan praktis tentang cara memilih bahan makanan yang tepat, teknik memasak yang mempertahankan kandungan gizi, dan strategi penyimpanan yang baik untuk meminimalkan kerugian nutrisi. Mereka juga diajarkan cara mengkreasikan hidangan sehat dan lezat dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang tersedia. Masyarakat Kota Madiun melalui konsumsi pangan B2SA dan pelatihan penyusunan menu serta pengolahan pangan diberdayakan untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat dan bergizi. Kegiatan ini akan membawa dampak positif dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi yang diciptakan harus sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah. Ketahanan pangan membutuhkan sarana dan prasarana untuk bergerak, membutuhkan anggaran untuk melakukan pengembangan karena program yang direncanakan banyak dan untuk merealisasikannya membutuhkan anggaran lebih. Sejalan dengan itu, butuh adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan masyarakat serta teknologi pangan dan gizi. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan bisa dilakukan dengan pelatihan pemantauan gizi, pelatihan pemantauan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pelatihan konseling menyusui dan menambah jumlah tenaga gizi dan sanitasi kelurahan. Kemudian kegiatan pemberdayaan untuk tingkat kelurahan yang inklusif tanpa melihat perbedaan peran perempuan dan laki-laki, seperti pelaksanaan pengelolaan P2L yang sudah berjalan harus dipertahankan.

Berikut tahapan yang ideal bisa dijalankan untuk peningkatan kinerja:

1. sosialisasi dan penyuluhan masyarakat, program sosialisasi dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya pola makan seimbang dan kebiasaan makan sehat perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, lokakarya dan program kemasyarakatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat;
2. penguatan infrastruktur pangan, perlunya perbaikan infrastruktur yang mendukung distribusi pangan berkualitas tinggi dan bergizi. Hal ini mencakup pengembangan pasar yang bersih dan teratur, fasilitas penyimpanan yang baik, dan sistem distribusi yang efisien untuk menjamin akses terhadap pangan bergizi bagi seluruh warga negara;
3. pengembangan pertanian modern, mendukung pertanian perkotaan untuk meningkatkan produksi pangan yang berkualitas dan bergizi. Program bimbingan teknis, pemberian bibit unggul, dan penggunaan teknologi pertanian yang inovatif dapat mendukung pertanian perkotaan untuk meningkatkan produksi pangan berkualitas tinggi dan bergizi;
4. penguatan kelembagaan, penguatan kelembagaan dan kebijakan terkait pangan dan gizi penting untuk memastikan pemantauan yang efektif, regulasi pasar yang adil, dan distribusi pangan yang merata;
5. kolaborasi multi sektor, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan pendekatan terpadu guna memperbaiki masalah pangan dan gizi. Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memastikan program yang dilaksanakan memberikan dampak yang signifikan; dan
6. pemantauan dan evaluasi, diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan menilai efektivitas program yang dilaksanakan. Data yang akurat dan tepat waktu menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat guna meningkatkan kinerja pembangunan pangan dan gizi di Kota Madiun.

Pemerintah Kota Madiun juga menghadirkan P2L sebagai upaya untuk pemanfaatan lahan kurang produktif dengan berfokus agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Selain itu, program P2L juga dapat diartikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperhatikan peran wanita dalam pembangunan.

Kota Madiun memiliki kurang lebih 50 P2L yang tersebar diseluruh kelurahan. Beberapa dari total keseluruhan P2L yang juga merupakan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat yakni:

1. P2L Pari Mandiri

P2L Pari Mandiri ini terletak di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. P2L ini berdiri dengan anggaran APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun tahun 2022. Anggaran yang diberikan sebesar Rp 50.000.000 digunakan untuk pembangunan *green house*, pembenihan, produksi dan pascapanen. Anggota dari P2L ini merupakan warga sekitar yang terdiri dari beberapa RT dan RW. Anggota yang terlibat 80% merupakan ibu-ibu yang sebagian juga merupakan anggota PKK, sedangkan sisanya adalah bapak-bapak dan pemuda sekitar. Terdapat beberapa inovasi yang dilakukan oleh P2L Pari Mandiri, seperti menanam tanaman *urban farming*, seperti penanaman beberapa jenis sawi secara hidroponik (sawi hijau, kailan, pakcoy dan caisim) yang merupakan solusi masyarakat dalam menghadapi minimnya lahan sebagai upaya pemenuhan program pangan dan gizi. Tidak hanya itu saja, selain secara *urban farming*, P2L ini juga menanam bayam brazil, buah jambu dan markisa secara konvensional.

Urban farming adalah salah satu solusi sistem pertanian di kota, karena saat ini terjadi penyempitan lahan kosong akibat pembangunan di perkotaan. Tujuan utama kegiatan pertanian perkotaan adalah untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Kegiatan *urban farming* dilakukan dalam dua bentuk kegiatan yaitu warung hidup dan budikdamber (budidaya ikan dan tanaman dalam ember). Penerapan dilakukan melalui sosialisasi budikdamber yang terdiri dari ikan lele dan tanaman kangkung serta melalui kegiatan pembuatan warung hidup dengan memanfaatkan perkarangan rumah warga dan yang lebih difokuskan pada tanaman-tanaman yang sering dikonsumsi oleh keluarga dan mudah untuk dibuat dalam bercocok tanam.

Hasil produksi sayur dan buah ini kemudian digunakan dalam kegiatan sosial, misalnya digunakan untuk program pemberian bantuan pangan dan gizi secara gratis kepada Balita *stunting* secara berkala yakni 1 bulan sekali di posyandu Kelurahan Manisrejo dan juga dijual secara komersial.

Program pemberian bantuan pangan dan gizi secara gratis kepada Balita *stunting* ini dilakukan melalui kerjasama antara P2L dengan kader PKK dan Posyandu dan berjalan mulai akhir tahun 2022. Sayur dan buah segar yang telah di bungkus kemudian diberikan kepada orang tua Balita *stunting* sesuai dengan data yang ada. Hal ini diharapkan dapat turut serta dalam penurunan angka *stunting* di Kota Madiun. Sampai pada tahun 2023 ini jumlah Balita *stunting* ini berjumlah 20 Balita.

Sedangkan dari sisi komersial dilakukan dengan cara penjualan sayur dan buah di pasar dan masyarakat sekitar. Namun dalam praktiknya, harga yang diberikan memiliki perbedaan, yakni Rp4.000 di masyarakat (saat di Posyandu) dan Rp5.000 di pasar. Mekanisme harga tersebut adalah 20% dari harga digunakan untuk pemeliharaan (air dan listrik) dan sisanya sebesar 80% masuk ke dalam kas yang digunakan sebagai penunjang peningkatan kualitas P2L dan anggotanya termasuk kedalamnya adalah pembelian alat, bibit, nutrisi, keikutsertaan lomba, maupun pelaksanaan program-program atau inovasi baru. Inovasi lain yang juga dilakukan adalah dibukanya wisata edukasi yang ditujukan untuk berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari anak TK hingga perguruan tinggi. Wisata edukasi ini bertujuan untuk membuka wawasan terkait dengan kegiatan usahatani dan juga menanamkan pada para wisatawan untuk gemar menanam dan memakan sayur dan buah sebagai pemenuhan gizi.

Melalui kegiatan wisata edukasi dan studi tiru ini P2L menawarkan 2 paket harga yang berbeda yakni paket A Rp15.000 (wisata edukasi, jus bayam brazil lemon dan nanas lengkap dengan roti) dan paket B Rp20.000 (wisata edukasi, tanaman dalam *polybag* dan jus sayur). Kemudian, P2L dalam hal ini juga melakukan pemasaran secara *offline* yakni bazar. Berbagai produk dari hasil usaha tani maupun inovasi dari anggota dan UMKM antara lain adalah jus bayam brazil, bluder Issmi, tahu susu, kerupuk kuda lumping, tahu kuning, pupuk organik, dan aneka tanaman.

Adanya kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa toleransi, saling menghargai dan gotong-royong antar warganya. Selain itu juga, inovasi ini dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga yang berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga melalui tercapainya daya beli bagi masyarakat untuk pangan dan gizi.

Lebih lanjut lagi, P2L Pari Mandiri ini juga memiliki program bank sampah dengan inovasi bak terbuka yang ditempatkan di setiap rumah warga. Inovasi ini membuat sampah yang ada di masyarakat (bersih maupun kering) tidak memiliki bau dan bersifat kering. Hal ini dikarenakan bak sampah yang terbuka dapat membuat sampah langsung dapat terpapar angin dan sinar matahari secara langsung sesaat setelah sampah tersebut dibuang, sehingga sampah langsung kering. Sampah yang ada akan diakumulasikan di tempat yang telah disediakan setiap harinya dan akan diolah menjadi pupuk kompos. Inovasi ini dilakukan dengan upaya menciptakan lingkungan dan udara yang bersih. Hal ini juga merupakan tujuan dalam mendukung program perbaikan pangan dan gizi. Hal ini terjadi karena lingkungan, pangan dan gizi akan berjalan secara linier.

P2L Pari Mandiri merupakan P2L yang paling maju diantara P2L yang ada di Kota Madiun. P2L meraih peringkat 1 sebagai P2L terbaik di tingkat Kota Madiun pada tahun 2022, baik dari segi administrasi, kondisi fisik lingkungan kebun, program dan inovasi yang dilakukan. Selain itu juga bekerjasama bersama seluruh masyarakat sekitar berhasil meraih juara 1 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BPGRM). Lomba ini merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Selain itu juga merupakan lokus utama dalam perlombaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pedoman dalam menjalankan STBM ini terdiri dari lima pilar, yaitu:

1. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
2. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT);
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT);
4. Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga (PALDRT); dan
5. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

Selain itu P2L Pari Mandiri juga meraih juara 1 provinsi tahun 2023 dalam lomba Lingkungan Bersih Sehat (LBS) dan Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Beberapa anggotanya yang juga merupakan kader PKK pun berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, seperti juara 1 dan juara 3 dalam pelaksanaan Lomba Administrasi PKK tahun 2017. Selanjutnya dampak dari kerjasama dari berbagai pihak (P2L, PKK dan Posyandu) dalam memperhatikan kesehatan anak, pemenuhan pangan dan gizi serta penurunan angka *stunting*, Posyandu ini meraih prestasi yakni peringkat 9 dalam pemilihan Posyandu berprestasi di tingkat Provinsi di tahun 2023. Sebagai dampak positif dari adanya berbagai penghargaan tersebut maka Kelurahan ini menjadi lokasi proklamasi utama dan dijadikan sebagai penerima *awardee* dalam indikator ketahanan pangan.

2. P2L Permata Hijau

P2L Permata Hijau ini terletak di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. P2L ini sebenarnya merupakan program pemerintah yang telah lama berdiri, yakni sejak tahun 2018. Sebelumnya P2L ini berbentuk Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan mendapatkan bantuan dari APBD sebesar 50 juta, yang kemudian namanya berubah menjadi P2L dengan tidak lagi mendapatkan bantuan dan mengandalkan permodalan secara mandiri, namun pernah mendapatkan bantuan 2.000 bibit lele dari provinsi Jawa Timur.

Anggota yang dimiliki secara keseluruhan adalah 15 orang, dimana anggotanya juga merupakan kader PKK. Mekanismenya P2L ini memanfaatkan lahan kosong yang ada di kelurahan tersebut yang kemudian dilakukan penanaman berbagai macam tanaman sayur dan buah seperti sawi, kailan, tomat, terong, jeruk dan mangga.

Selain itu, di dalam pemanfaatan lahan kosong tersebut juga digunakan untuk budidaya lele. Hasil produksi baik sayuran, buah ataupun ikan, digunakan untuk menunjang program pembangunan pangan dan gizi Kota Madiun melalui pemberian makanan secara gratis kepada Balita *stunting*. Program ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan dilakukan secara berkala ataupun mengikuti program dan acara pemerintah. Pemberian yang dilakukan adalah merupakan pangan olahan, seperti abon lele, rolade lele, sayur segar, serta jus. Hal ini dilakukan dengan harapan tingkat atau prosentase Balita *stunting* di Kota Madiun dapat menurun. Saat ini jumlah Balita *stunting* yakni berjumlah 5 Balita. Program ini dilakukan melalui kerjasama antara P2L, kader PKK dan posyandu Kelurahan Kartoharjo.

Anggota P2L yang juga sekaligus menjadi kader PKK memberikan dampak positif berupa penggalakan program B2SA pada masyarakat setempat, salah satunya adalah dengan mewajibkan setiap rumah tangga menanam tanaman terong, lombok, dan tomat, minimal 1 *polybag*. Mulai tahun 2023 kacang tanah ditambahkan menjadi tanaman wajib dan totalnya 4 (empat) item. B2SA ini juga dilakukan dengan penjualan lele yang harganya lebih murah apabila dibandingkan di pasar, yakni Rp23.000 per kilogram. Selain itu, hasil sayur dari pemanfaatan pekarangan ini juga akan di jual kepada masyarakat setempat dengan harga Rp4.000/pack sebagai upaya dalam pemenuhan pangan dan gizi. Inovasi selanjutnya adalah P2L permata hijau menerima kunjungan studi dari sekolah maupun perguruan tinggi. Kegiatan penjualan dan kunjungan ini juga dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan P2L dan juga masyarakat.

P2L Permata Hijau ini juga telah mendapatkan berbagai penghargaan seperti juara 1 KRPL di tahun 2018, juara 3 P2L di tahun 2020 dan yang terbaru adalah meraih juara 1 P2L terbaik di tahun 2023, baik dari segi administrasi, kondisi lapang kebun, program dan inovasi. Kader PKK yang juga menjadi anggota dari P2L ini juga meraih juara umum Cipta Menu se-Kota Madiun. Akibatnya, anggotanya diminta menjadi pemasok utama bahan makanan olahan di acara besar Kota Madiun, seperti pada saat Hari Jadi Kota Madiun, yang secara tidak langsung berperan juga dalam peningkatan pangan dan gizi.

3. Proklamasi Lestari

Proklamasi Lestari ini merupakan proklamasi terbaru dari semua P2L yang ada di Kota Madiun yang berada di Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Proklamasi ini berdiri atas dasar pembiayaan dari APBN Ditjen Hortikultura tahun 2023, sehingga masih belum banyak program, inovasi ataupun pencapaian yang diraih. Salah satu program yang sudah dilakukan adalah pemberian sayur segar pada Balita *stunting* dan anak Balita sehat. Berbagai kendala masih terus dihadapi baik dari segi administrasi, partisipasi masyarakat dan juga permodalan dalam menjalankan dan menjaga kontinuitas proklamasi.

Berdasarkan implementasi langkah-langkah secara holistik dan berkelanjutan tersebut diharapkan Kota Madiun dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan pangan dan gizi, serta mendukung tercapainya program pentahelix yang ada di daerah. Konsep pentahelix atau multi pihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis. Salah satu tujuan pendekatan ini adalah dalam rangka upaya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat untuk menemukan pola kemitraan dalam pengembangan potensi suatu kawasan yaitu dengan melibatkan multipihak yang saling bersinergi.

Penghargaan yang dicapai oleh P2L Kota Madiun diantaranya sebagai berikut:

1. Kota Sehat Kemenkes;
2. Satya Wirakarya;
3. Capaian PPH di atas nasional (Bapanas);
4. Peningkatan presentase konsumsi ikan (dari provinsi); dan
5. Pencapaian nomor 3 vaksin PMK se-Jatim.

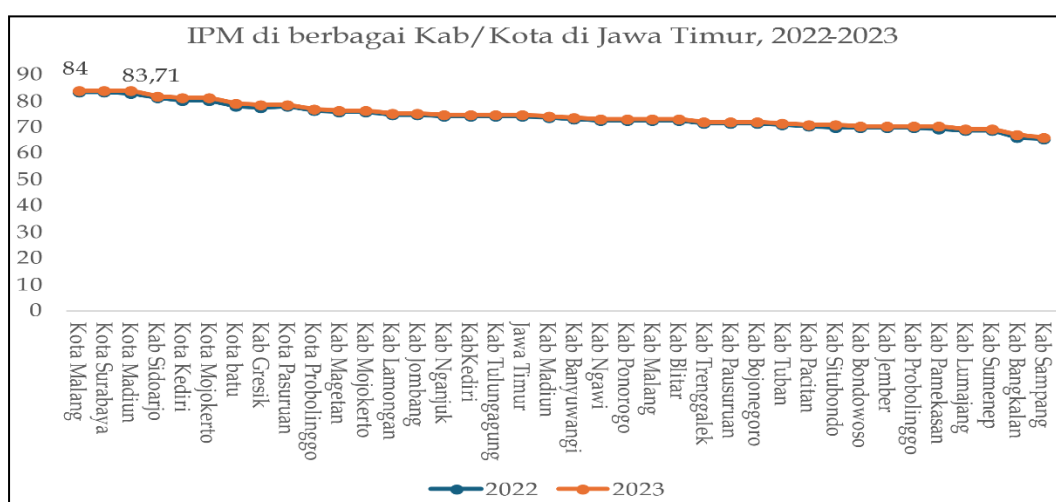
2.3 Situasi Kesehatan dan Gizi di Kota Madiun

2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Madiun

Pengukuran tingkat pembangunan kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan IPM tidak hanya memperhitungkan tingkat standar hidup masyarakat saja, tetapi juga berkaitan dengan pengetahuan dan juga hidup sehat dan angka harapan hidup masyarakat. Secara lebih rinci, tiga dimensi dasar yang digunakan untuk mengukur IPM dengan menggunakan metode ini:

1. hidup sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran;
2. pengetahuan yang diukur dengan Angka Melek Huruf yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, dan Rata-Rata Lama Sekolah yaitu rata-rata menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal; dan
3. standar kehidupan yang layak diukur dengan produk domestik bruto per kapita dengan paritas daya beli.

Dekade terakhir ini pembangunan manusia di Kota Madiun terus mengalami kemajuan. IPM Kota Madiun pada Gambar 17 meningkat dari 81,93 pada tahun 2020 menjadi 83,71 pada tahun 2023. Kota Madiun menempati posisi 3 besar setelah Kota Malang dan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, jika dilihat dari skor IPM, ketiga kota tersebut memiliki nilai IPM yang hampir sama.

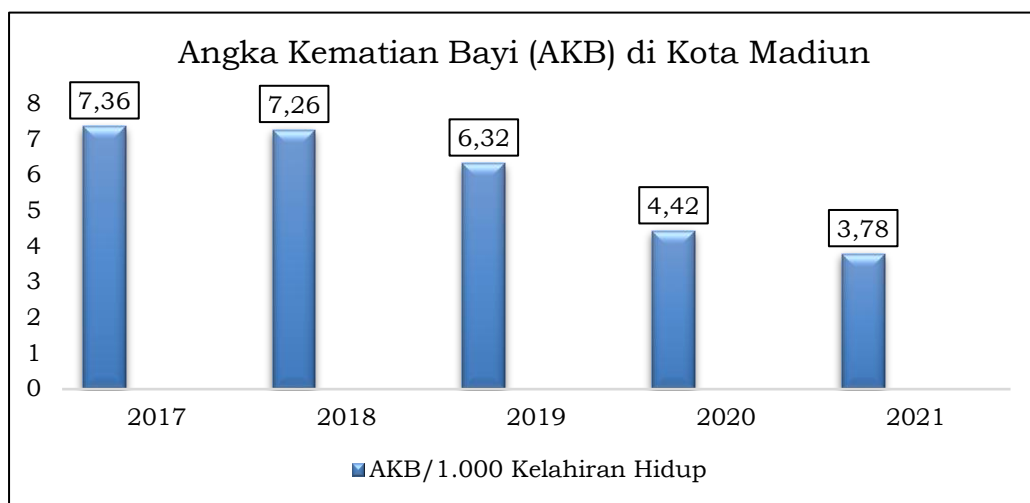


Gambar 17. Nilai IPM di Berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

2.3.2 Kesehatan Ibu dan Anak di Kota Madiun

Tingkat permasalahan Angka Kematian Bayi (AKB) dari waktu ke waktu mengalami tren yang menurun sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 18. AKB atau yang disebut juga dengan Angka Kematian Neonatal di Kota Madiun pada tahun 2021 adalah sebesar 3,78 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah absolutnya yakni sebanyak 9 neonatus dari 2.382 kelahiran hidup. Nilai ini adalah nilai yang jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai 7,36 pada tahun 2017. AKB ini sudah memenuhi target SDG's bahkan di bawah standar yang diterapkan yakni sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup.



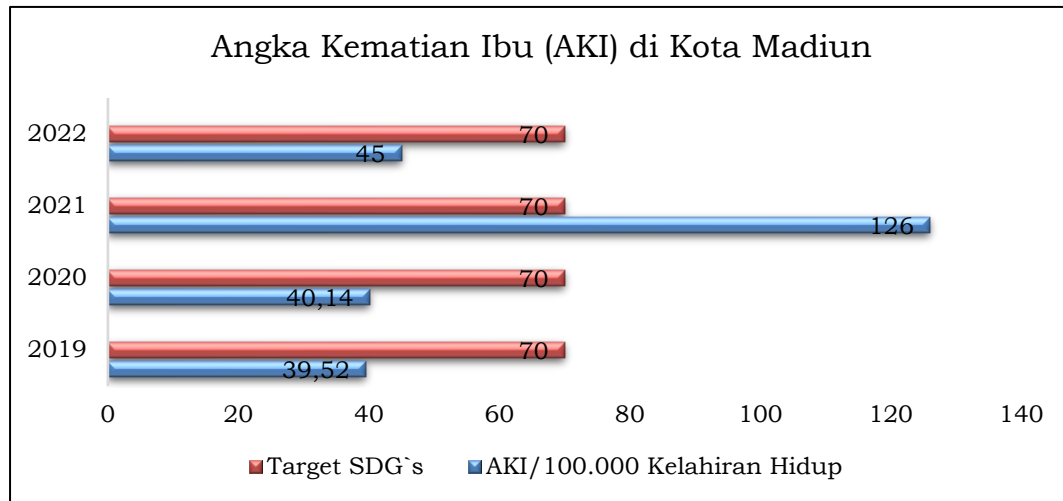
Gambar 18. Prosentase Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Madiun Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun (2021)

Penyebab tingginya AKB di tahun 2017 yakni sebesar 2 kematian adalah akibat berat badan lahir rendah (BBLR), 3 kematian akibat asfiksia, 1 kematian disebabkan oleh kelainan bawaan dan 3 kematian disebabkan oleh yang lainnya. Tingkat AKB ini masih perlu diupayakan lagi untuk ditekan lagi nilainya melalui upaya peningkatan lintas program dan sektor dengan kerjasama dari multi pihak.

Selain AKB, terdapat indikator lainnya dalam penentuan tingkat nilai IPM, yakni tingkat Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu yang dimaksudkan disini adalah kematian seorang ibu pada masa kehamilan, bersalin atau nifas, bukan karena kecelakaan atau lainnya.

AKI merupakan salah satu indikator dampak Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), di samping AKB. AKI dan AKB merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah dan juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan IPM. AKI dihitung per 100.000 kelahiran hidup seperti pada Gambar 19.



Gambar 19. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Madiun Tahun 2017-2021

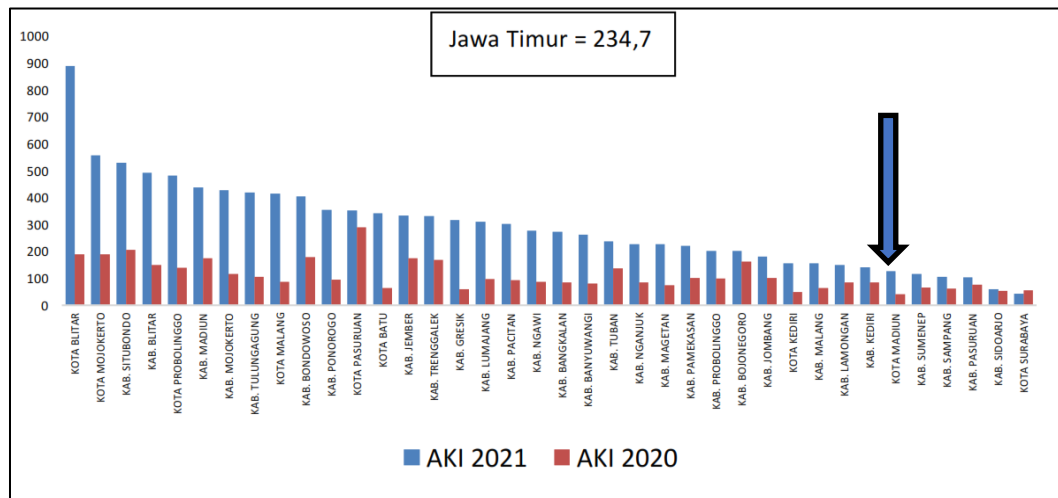
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun (2021)

AKI pada tahun 2021 adalah sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini memberikan sebuah informasi bahwa terdapat kematian ibu sebanyak 126 per 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 3 orang. Tahun 2021, kematian tersebut diakibatkan oleh ibu terinfeksi oleh virus COVID-19. Perhitungan AKI ini dipengaruhi oleh jumlah kelahiran hidup. Tahun 2021 perkiraan kelahiran hidup sebanyak 2.264. Nilai ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2.491, yang menyebabkan jika terdapat 1 kematian ibu, maka AKI menjadi lebih tinggi.

AKI di Kota Madiun ini menduduki peringkat ke-6 terendah se-Provinsi Jawa Timur seperti dapat dilihat dalam Gambar 20. Upaya peningkatan keterampilan klinis petugas di lapangan tetap dilakukan dengan melibatkan multi pihak. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu di Kota Madiun yaitu:

1. peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal;
2. peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi;
3. pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energi kalori (KEK) hingga masa nifas;
4. memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) terpadu, yaitu 10 T plus skrining diabetes militus (DM), hipertensi, jantung, hepatitis, dan HIV/AIDS di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta;
5. menjalin kerjasama dengan SpOG terkait pelayanan rujukan pada ibu hamil; dan

6. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan.



Gambar 20. Perbandingan Tingkat Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota/Kabupaten Se-Provinsi Jawa Timur
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun (2021)

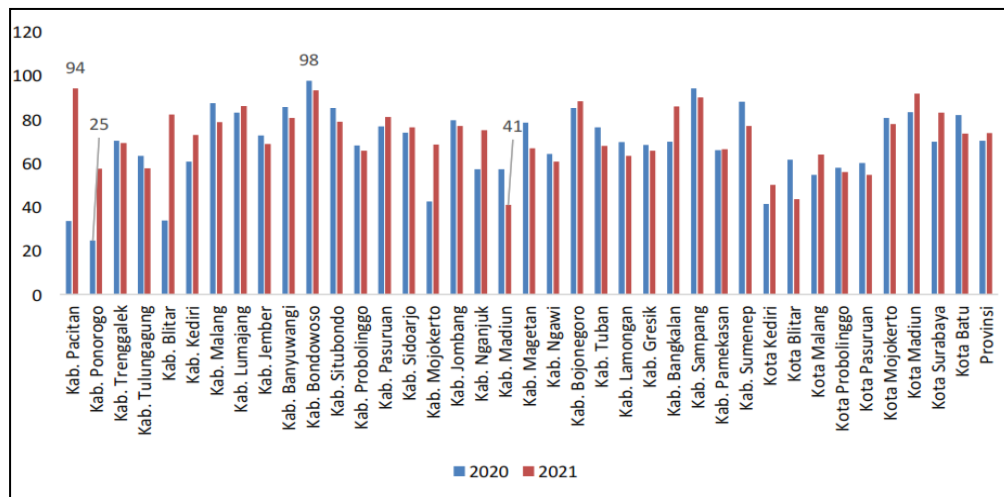
Upaya dalam meningkatkan IPM juga dipengaruhi oleh faktor penting lainnya, yakni Inisiasi Menyusui Dini (IMD). IMD di Kota Madiun masih menduduki peringkat ke-3 se-Provinsi Jawa Timur di tahun 2021. Tingkat IMD ini masih perlu untuk ditingkatkan agar dapat meningkatkan nilai IPM.

IMD merupakan permulaan menyusui dini yang dilakukan dengan usaha bayi sendiri segera setelah bayi lahir. IMD dapat dilakukan dengan meletakkan bayi dalam posisi tengkurap pada dada atau perut ibu tanpa terhalang oleh kain, selama minimal satu jam dimulai segera setelah bayi lahir.

Manfaat dari dilakukannya upaya IMD membantu mempermudah ibu dalam memproduksi ASI karena gerakan bayi selama berada di atas tubuh ibu akan membantu mengeluarkan hormon oksitosin yang berperan dalam produksi ASI. Sehingga, jika produksi ASI melimpah, maka kebutuhan ASI yang dianjurkan oleh pemerintah selama 2 tahun akan dapat terpenuhi dan akan memperbaiki kualitas tumbuh bayi tersebut. Kontak kulit bayi dan kulit ibu juga akan membantu menstabilkan frekuensi napas dan denyut jantung bayi sehingga bayi akan lebih jarang menangis, ibu pun juga merasa lebih tenang. Aktivitas bayi merangkak, menjilat, dan menyusui pada payudara ibu juga berperan sebagai kontak mikrobiom, yaitu proses mendapatkan bakteri baik dari kulit ibu. Bakteri baik yang tertelan bayi ini berperan dalam menurunkan risiko infeksi pada bayi baru lahir serta dapat meningkatkan imunitas bayi untuk melawan bakteri jahat dari lingkungan.

Bagi bayi yang diberi kesempatan untuk melakukan IMD memiliki peluang keberhasilan menyusui eksklusif yang lebih baik. Bayi juga akan mendapatkan ASI kolostrum, yaitu cairan ASI yang pertama kali keluar sejak hari pertama sampai dengan hari kelima setelah persalinan. Kolostrum ini berwarna kuning pekat dengan konsistensi yang kental dan lengket. Kandungannya sangat kaya akan antibodi, tinggi protein, serta kaya akan vitamin larut lemak dan mineral. Kolostrum sangat penting bagi daya tahan tubuh bayi terhadap infeksi dan akan melindungi dinding usus bayi, sehingga pemberian ASI eksklusif yang dimulai sejak bayi lahir ini sangat berperan mengurangi risiko kematian bayi dan tingkat stunting.

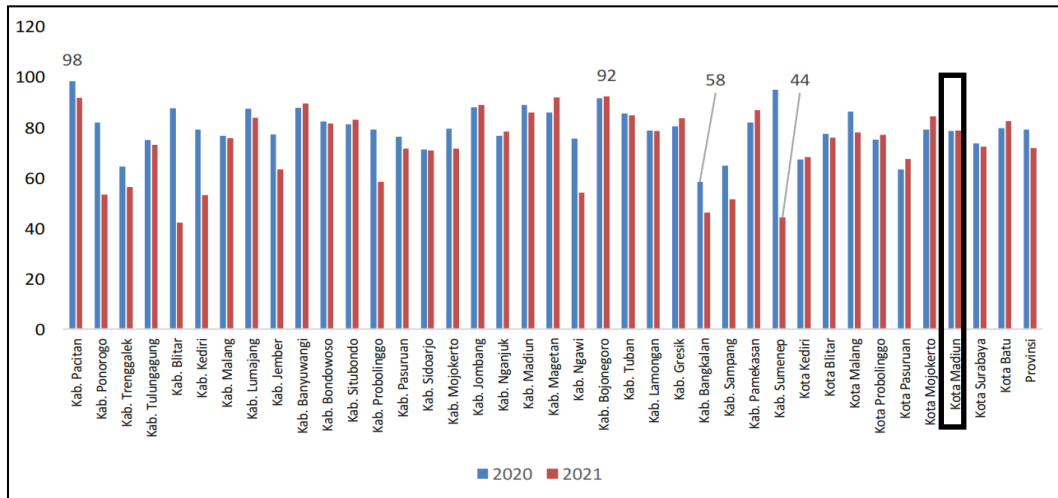
Gambar 21 menunjukkan Persentase bayi lahir dengan IMD per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dimana Kota Madiun menunjukkan Persentase yang tinggi atas pengukuran IMD ini.



Gambar 21. Persentase Bayi Baru Lahir dengan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) per Kabupaten/Kota di Jawa Timur

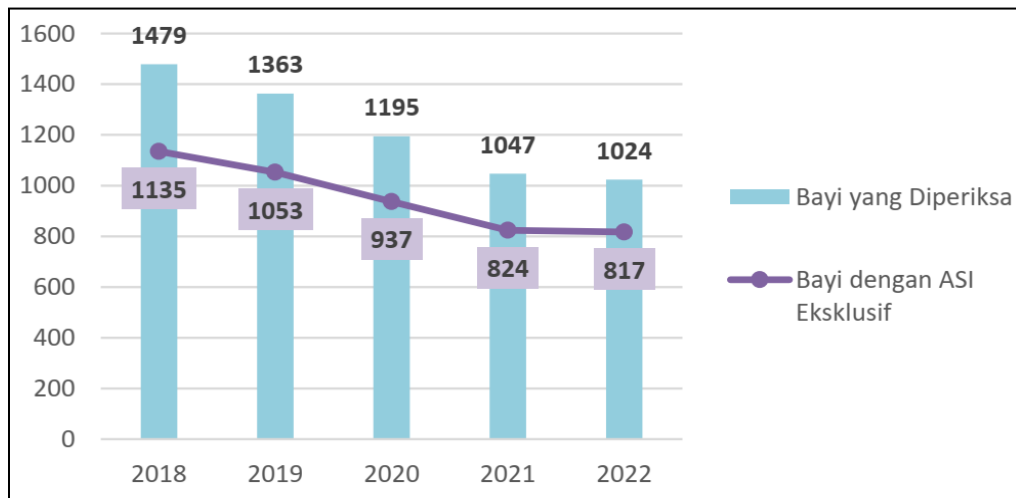
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun (2021)

Selaras dengan IMD, tingkat Persentase pemberian ASI eksklusif untuk bayi di bawah 6 bulan di Kota Madiun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 22 termasuk dalam kategori yang relatif tinggi. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan dan minuman lain sampai bayi berusia 6 bulan, kemudian pemberian ASI harus tetap dilanjutkan sampai bayi berusia 2 tahun walaupun bayi sudah makan. Pengertian ASI eksklusif menurut Kementerian Kesehatan RI maupun *World Health Organization* (WHO) adalah bayi yang berusia 0-6 bulan yang masih diberi ASI saja pada saat didata. Artinya, bila ada bayi yang berumur 0 bulan atau 1 bulan dan seterusnya sampai 5 bulan masih diberi ASI saja, maka pada saat itu dia dicatat sebagai bayi 0-6 bulan yang eksklusif, sehingga angkanya jelas jauh lebih tinggi dibanding dengan yang murni 6 bulan eksklusif.



Gambar 22. Persentase Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi < 6 Bulan per Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun (2021)

Secara lebih detail, cakupan ASI eksklusif di Kota Madiun pada tahun 2022 sebesar 817 bayi (79,8%) dari 1.024 bayi yang diperiksa, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 824 bayi (78,7%) dari 1.047 bayi yang diperiksa. Tren pemberian ASI eksklusif pada tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar 23.



Gambar 23. Tren Cakupan ASI Eksklusif di Kota Madiun
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun (2022)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian ASI eksklusif, yaitu:

a. Faktor psikologis

Beberapa ibu yang baru melahirkan dapat timbul stress akibat perubahan yang dialami dan muncul kekhawatiran tidak dapat memberikan ASI yang justru malah menghambat produksi ASI.

b. Faktor pemberi pelayanan persalinan

Beberapa institusi pelayanan kesehatan masih ada yang belum menjalankan inisiasi menyusui dini dan cenderung mengedepankan pemberian susu formula pada bayi yang baru lahir.

c. Faktor ibu bekerja

Tuntutan ekonomi saat ini menyebabkan banyak ibu harus bekerja di luar rumah. Hal ini disertai perubahan pola pengasuhan anak dari ibu kepada pengasuh lain. Berdasarkan alasan kepraktisan, bayi lebih sering diberikan asupan susu formula.

d. Faktor budaya

Walaupun saat ini tingkat pendidikan masyarakat sudah cukup tinggi, namun budaya masyarakat yang terbiasa memberikan makanan/minuman selain ASI sejak bayi lahir seperti air putih, madu, pisang, nasi pisang, dan lain sebagainya masih sulit dihilangkan.

e. Faktor promosi

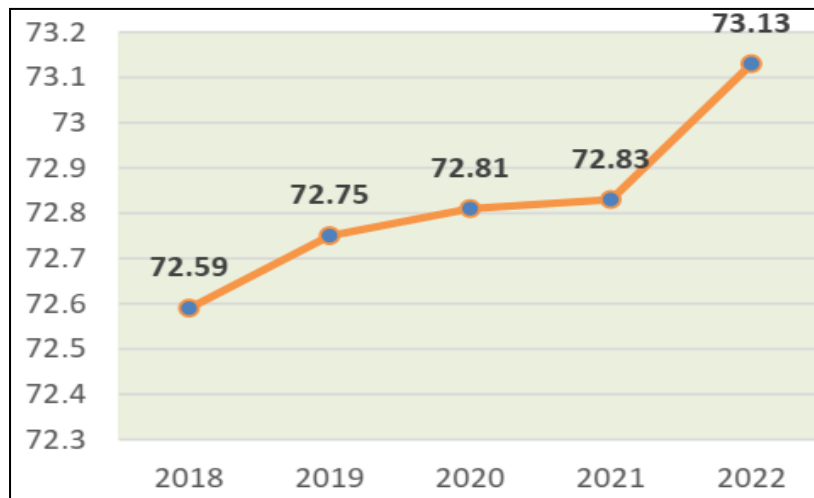
Promosi susu formula lebih gencar ditayangkan di media masa dibandingkan promosi ASI eksklusif sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemberian ASI eksklusif.

Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan perilaku, maka untuk perbaikan di masa yang akan datang diperlukan upaya-upaya promosi kesehatan yang lebih intensif baik kepada perorangan (konseling) maupun institusi pemberi pelayanan kesehatan tentang keunggulan ASI eksklusif dan peningkatan kelompok pendukung ASI di Kota Madiun.

2.3.3 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Madiun

Angka/Umur Harapan Hidup (AHH/UHH) secara definisi adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk dari sejak lahir. AHH dapat dijadikan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi di suatu wilayah, termasuk di dalamnya derajat kesehatan. Data AHH diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

AHH dihitung oleh BPS yang dipengaruhi beberapa indikator. AHH juga dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah pada saat itu. AHH berhubungan erat dengan AKB, sehingga secara teoritis, meningkatnya angka harapan hidup diwujudkan dari menurunnya AKB. AHH di Kota Madiun pada tahun 2022 sebesar 73,13. Tren AHH di Kota Madiun pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Tren Angka Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2018-2022
Sumber: BPS (2022)

2.3.4 Layanan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar di Kota Madiun

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan telah dilakukan untuk memperkecil resiko terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai akibat dari lingkungan yang kurang sehat. Beberapa indikator yang menggambarkan kondisi lingkungan antara lain rumah sehat, tempat pengelolaan makanan, air bersih, dan sarana sanitasi dasar seperti pembuangan air limbah, tempat sampah dan kepemilikan jamban serta sarana pengolahan limbah di sarana pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan kondisi penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar di Kota Madiun telah dilaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menitikberatkan pada upaya preventif dan promotif terpadu melalui upaya memicu dan mempertahankan keberlanjutan perubahan perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat, sehingga peran aktif masyarakat dalam penyediaan sanitasi dasar melalui 3 komponen STBM yang terdiri atas upaya menciptakan kebutuhan (*demand*), penyediaan layanan (*supply*) dan penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*).

Ketiga komponen STBM tersebut menjadi landasan strategi pelaksanaan untuk pencapaian 5 (lima) pilar STBM sebagai berikut:

1. stop buang air besar sembarangan;
2. cuci tangan pakai sabun;
3. pengolahan air minum dan makanan rumah tangga;
4. pengolahan sampah rumah tangga; dan
5. pengolahan limbah cair rumah tangga.

Kota Madiun pada tahun 2015 telah mendapatkan Ppnghargaan Swasti Saba Padapa yang diperoleh dari hasil verifikasi Tim Verifikasi Kota Sehat dari provinsi di tahun 2014 dan nasional di tahun 2015. Penghargaan Swasti Saba Padapa ini telah lolos verifikasi terhadap 2 tatanan, yaitu tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri pada Kelurahan Winongo dan tatanan kawasan pemukiman sarana dan prasarana sehat pada Kelurahan Nambangan Kidul.

Kota Madiun pada tahun 2016 lolos mendapatkan verifikasi dari provinsi dalam 5 tatanan, yaitu 2 tatanan dari penghargaan tahun sebelumnya dan 3 tatanan baru. 5 tatanan yang diverifikasi adalah tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, tatanan kawasan pemukiman sarana dan prasarana sehat, tatanan kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, tatanan kawasan industri dan perkantoran sehat, dan tatanan kawasan ketahanan pangan dan gizi.

2.2.5 *Stunting* di Kota Madiun

Stunting merupakan satu dari beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya yang mempengaruhi tingkat IPM. Kunci utama *stunting* ini adalah terletak pada permasalahan gizi. *Stunting* adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* sekaligus menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Apabila tingkat *stunting* ini semakin tinggi setiap tahunnya, maka akan memberikan dampak pada menurunnya tingkat IPM. Permasalahan gizi dan *stunting* ini juga dibahas dalam poin SDGs.

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah status gizi Balita. Status gizi adalah keadaan yang menunjukkan keseimbangan antara asupan zat gizi dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh. Status gizi Balita adalah cerminan ukuran terpenuhinya kebutuhan gizi pada Balita yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat yang berujung pada penilaian tingkat IPM. Penilaian status gizi dapat diukur dengan antropometri atau pengukuran bagian tertentu dari tubuh. Indikator yang digunakan adalah Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB).

Jumlah Balita sasaran proyeksi estimasi di Kota Madiun tahun 2021 sebanyak 11.734 Balita, jumlah Balita yang datang dan ditimbang sebanyak 6.442 Balita (D/S: 54,9%). Berdasarkan hasil kegiatan Bulan Timbang di Bulan Agustus 8.532 Balita yang ditimbang didapatkan hasil Balita gizi kurang (BB/U) sebanyak 717 Balita (8,4%). Jumlah Balita yang diukur tinggi badan sebanyak 8.490 Balita dengan hasil Balita pendek (TB/U) sebanyak 632 Balita (7,4%). Jumlah Balita yang diukur tinggi badan dan berat badan didapatkan hasil Balita kurus 622 Balita (7,3%). Upaya-upaya penanggulangan masalah gizi pada Balita yang telah dijalankan dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk intervensi langsung seperti PMT, perawatan gizi buruk, maupun intervensi tidak langsung seperti pendidikan gizi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas petugas gizi, pembentukan kelompok-kelompok pendukung ASI dan sebagainya. Angka *stunting* tahun 2023 di Kota Madiun adalah sebesar 4,7% yang dapat dilihat dari Gambar 25. Jumlah prosentase ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 25. Jumlah Balita Stunting di Kota Madiun Tahun 2017-2023

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun (2024)

2.2.6 Pola Pangan Harapan (PPH), Angka Kecukupan Energi (AKE), dan Angka Kecukupan Protein (AKP) di Kota Madiun

Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi selalu menjadi program prioritas dalam setiap pembangunan nasional, yang ditandai dengan dijadikannya beberapa indikator kualitas dan kuantitas konsumsi seperti konsumsi energi, protein, dan PPH sebagai indikator pencapaian pembangunan nasional. Skor PPH juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengevaluasi konsumsi pangan di suatu wilayah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan atau dasar untuk penyusunan perencanaan kebutuhan konsumsi pangan wilayah ke depan.

Sumber data Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang ketahanan pangan, PPH di Kota Madiun pada tahun 2018 ada pada angka 95,45. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kota Madiun memiliki ketertarikan dan pola pikir yang baik terhadap pola pangan B2SA. Tahun 2023, 4 provinsi dengan capaian skor PPH terbaik yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta (96,26), Nusa Tenggara Barat (94,7), Jawa Tengah (94,22), dan Sumatera Selatan (94,16). Sedangkan, peringkat 5 terbaik dari 51 kabupaten/kota dengan capaian skor PPH yang melebihi target RPJMN antara lain Kabupaten Sumenep (99,50). Kabupaten Wonosobo (99,15), Kabupaten Nagan Raya (98,92), Kabupaten Lombok Timur (98,10), dan Kabupaten Lumajang (97,38). Kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan AKE (kkal/kapita) sebesar 2.100 kkal/kapita dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.

PPH merupakan konsep yang bertujuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas, aman, bergizi, dan seimbang. Pola ini terdapat upaya untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat menuju pola makan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan mendorong konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan protein nabati serta hewani yang sehat. Selain itu, PPH juga mencakup pengurangan konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, gula tambahan, dan garam berlebih yang dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Melalui edukasi, kebijakan publik, dan kolaborasi antara pemerintah, industri pangan, dan masyarakat, diharapkan PPH dapat dijadikan panduan mengonsumsi makanan yang memberikan manfaat optimal bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan RAD-PG di Kota Madiun secara umum dimaksudkan untuk menyediakan kerangka kerja bagi seluruh *stakeholders* terkait bidang pangan dan gizi guna mewujudkan keamanan, keterjangkauan, dan penggunaan pangan yang baik sehingga terpenuhi gizi masyarakat untuk hidup sehat di Kota Madiun. Tujuan rinci penyusunan RAD-PG Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan guna menjamin kebutuhan energi dan protein masyarakat;
2. meningkatkan aksesibilitas atau keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
3. meningkatkan pengawasan kualitas dan keamanan pangan serta keberagaman konsumsi;
4. meningkatkan perbaikan gizi masyarakat;
5. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
6. menguatkan kelembagaan pangan dan gizi guna mendukung peningkatan perbaikan pangan dan gizi masyarakat.

Sedangkan, sasaran utama dalam implementasi RAD-PG Kota Madiun adalah meningkatnya stabilitas ketersediaan dan akses pangan agar dapat menjamin pemenuhan energi dan protein masyarakat, serta upaya perbaikan gizi masyarakat. Konvergensi program dalam pangan dan gizi utamanya pada sasaran masyarakat rentan baik dalam masalah akses pangan karena kemiskinan atau karena aspek gizi bagi ibu dan anak, utamanya permasalahan *stunting* yang juga menjadi isu nasional.

Berikut rincian sasaran RAD-PG Kota Madiun:

1. Pemenuhan Kebutuhan Gizi

Penyusunan RAD-PG dalam upaya memastikan pemenuhan kebutuhan gizi bagi seluruh masyarakat, terutama untuk anak dan ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini termasuk peningkatan akses terhadap pangan bergizi, pemantauan pertumbuhan anak, dan penyediaan layanan kesehatan yang mencakup pemantauan gizi dan pemberian suplemen gizi.

2. Penurunan Angka Gizi Buruk

Salah satu sasaran utama RAD-PG adalah menurunkan prevalensi gizi buruk di Kota Madiun tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui program-program intervensi yang berfokus pada penyuluhan gizi, promosi praktek gizi yang baik, dan penyediaan makanan tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Penanggulangan Kurang Energi Kronis

Sasaran RAD-PG bisa mencakup program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap makanan yang kaya energi, promosi gaya hidup aktif, dan pendidikan tentang pola makan sehat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Penting bagi RAD-PG untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya peningkatan gizi. Sasaran ini dapat mencakup pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, pelatihan tentang produksi pangan segar yang sehat (*urban farming*) dan pangan beragam dan bergizi, serta pengembangan program-program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi.

5. Keseimbangan Gizi

RAD-PG Kota Madiun juga dapat menetapkan sasaran untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keseimbangan gizi dalam pola makan. Hal ini termasuk promosi konsumsi buah-buahan, sayuran, protein nabati, dan makanan sumber protein hewani yang sehat.

6. Penguatan Sistem Pangan Lokal

RAD-PG juga dapat menetapkan sasaran untuk mengembangkan dan memperkuat sistem pangan lokal, termasuk mendukung implementasi *urban farming* atau P2L, memfasilitasi akses pasar bagi produk pertanian lokal, dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan di masyarakat.

Pada akhirnya, Kota Madiun dapat semakin memperbaiki aspek pangan dan gizi di masyarakat dan mewujudkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, yakni masyarakat yang sehat, aktif, produktif, dan sejahtera secara berkelanjutan. Sasaran rencana aksi daerah pangan dan gizi berpedoman pada RAN-PG menggunakan pendekatan multi sektor dengan berlandaskan pada situasi di Kota Madiun sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Tabel 3. Sementara target capaian program pembangunan pangan dan gizi Kota Madiun tertera secara rinci pada Tabel 4.

Tabel 3. Sasaran RAD-PG di Kota Madiun

<i>INPUT (PROGRAM)</i>	<i>OUTPUT</i>	<i>OUTCOME</i>	<i>IMPACT</i>
Peningkatan kesehatan bayi dan Balita	Presentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	Penurunan Balita gizi kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kematian Bayi • Angka Harapan Hidup
	Presentase Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Penurunan Balita gizi buruk	
	Persentase 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	Penurunan Balita <i>stunting</i>	
	Air Susu Ibu eksklusif untuk bayi 0-6 bln	Penurunan angka kematian bayi (/ 1.000 kelahiran hidup)	
Peningkatan kesehatan ibu	Presentase ibu hamil mendapat Fe	Penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil	Angka Kematian Ibu
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan <i>ante natal care</i> berkualitas		
Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase kelurahan sehat aktif dan mendapat pembinaan	Tingkat implementasi STBM	Angka Harapan Hidup
Peningkatan ketersediaan dan kemandirian pangan	Kelompok Pekarangan Pangan Lestari aktif	Ketersediaan energi dan protein	Kemandirian Pangan
	Ketersediaan pangan masyarakat		
Peningkatan aksesibilitas dan penganeekaragaman pangan	Kelurahan bebas <i>stunting</i>	Penurunan Balita <i>stunting</i>	Kualitas dan konsumsi pangan
	Tingkat Konsumsi pangan	Angka kecukupan energi	
	Tingkat konsumsi ikan	Angka kecukupan protein	
	Tingkat konsumsi pangan hewani		
	Konsumsi beras, sayur, buah, hewani	Pola Pangan Harapan	
Pengawasan mutu dan keamanan pangan	Proporsi makanan yang memenuhi syarat keamanan pangan	Kualitas dan keamanan pangan	Kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat
	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan (memenuhi persyaratan kemananan, mutu dan gizi)		
	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan		
	Tim terpadu pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan		
	Tingkat keamanan pangan (%)		

INPUT (PROGRAM)	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT
Penciptaan nilai tambah dan pengembangan bisnis pangan	Jumlah industri rumah tangga pangan yang dibina dalam produksi makanan sehat	Berkembangnya industri pangan	Peningkatan pendapatan
	Persentase produk makanan olahan industri rumah tangga pangan yang dinilai memenuhi syarat		
Perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase rumah tangga yang telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan sanitasi total berbasis masyarakat	Kebersihan lingkungan dan gaya hidup yang sehat di Kota Madiun	Kesehatan masyarakat meningkat
Penguatan kelembagaan pangan dan gizi	Frekuensi pertemuan Tim RAD-PG daerah dalam setahun yang dihadiri Wali Kota	Meningkatnya kapasitas dan kualitas koordinasi lintas sektor	Ketahanan pangan dan gizi masyarakat berbasis pendekatan multi pihak
	Jumlah koordinasi lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
	Jumlah keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam penanganan masalah pangan dan gizi		

Tabel 4. Target RAD-PG di Kota Madiun

INDIKATOR	UKURAN	DASAR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Indikator Ouput Aspek Kesehatan							
Prevalensi Balita <i>stunting</i>	%	12,8	11,8	10,8	9,8	8,8	7,5
Prevalensi Balita <i>wasting</i>	%	5,5	5,3	5,1	4,8	4,5	4,2
Air susu ibu eksklusif untuk bayi 0-6 bln	%	80,8	81	81,2	81,4	81,6	82
Angka kematian bayi (/ 1.000 kelahiran hidup)	1/1.000	5,11/1000K H	4,46/1 000KH	4,09/1 000KH	3,72/1 000KH	3,35/1 000KH	2,97/1 000KH
Angka kematian ibu (1/100.000 kelahiran hidup)	1/100.000	0/100.000K H	0/100. 000KH	0/100. 000KH	0/100. 000KH	0/100. 000KH	0/100. 000KH
Persentase Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap (usia 0-23 bulan)	%	100	100	100	100	100	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100

INDIKATOR	UKURAN	DASAR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jumlah industri rumah tangga pangan yang dibina dalam memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi	%	89	89	90	90	90	90
Persentase produk makanan olahan industri rumah tangga pangan yang dinilai memenuhi syarat	%	89	89	90	90	90	90
Persentase rumah tangga yang telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	%	71	71	71,3	71,6	71,9	72,2
Indikator Output Aspek Non Kesehatan							
Angka kecukupan energi	Kkal/kap/hari	2.1	2.056	2.069	2.077	2.086	2.094
Angka kecukupan protein	g/kap/hari	57	63	64	64	64	64
Ketersediaan energi	kkal/kap/hari	2.4	2.993	3.011	3.024	3.037	3.050
Ketersediaan protein	g/kap/hari	63	90	90	90	90	90
Ketersediaan produksi pangan utama (beras) thp konsumsi	%	N/A	217	217	217	217	217
Jumlah kelurahan rawan pangan	Kelurahan	7	6	5	4	3	2
Skor pola pangan harapan ketersediaan	Skor PPH	N/A	90,0	90,0	90,1	90,2	90,2
Skor pola pangan harapan konsumsi	Skor PPH	95,8	95,8	95,8	95,9	96,0	96,0
Tingkat keamanan pangan	%	80	100	100	100	100	100
Persentase kelurahan dengan kelompok kerja kelurahan sehat yang aktif berkegiatan	%	27	100	100	100	100	100
Persentase penduduk miskin	%	4,74	4,64	4,54	4,44	4,34	4,24

3.2 Ruang Lingkup

Penyusunan RAD-PG di Kota Madiun dilakukan dalam rangka menyelaraskan dan mensinergikan program kerja seluruh *stakeholders* terkait pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG yang disusun dapat memberikan peluang koordinasi antar *stakeholders* terkait yang lebih efektif dengan program pembangunan pangan dan gizi yang berkesinambungan. Ruang lingkup wilayah kegiatan penyusunan RAD-PG Kota Madiun meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Madiun dengan ruang lingkup substansi sebagai berikut:

1. melakukan *review* kebijakan yang terkait dengan pembangunan di bidang pangan dan gizi;
2. melakukan survei dan pengumpulan data;
3. melakukan analisis dan informasi;
4. merumuskan hasil kajian sebagai masukan penyusunan RAD-PG Kota madiun; dan
5. merumuskan RAD-PG Kota Madiun.

Terdapat empat tujuan strategis yang digunakan sebagai prinsip dasar penyusunan RAD-PG Kota Madiun sesuai dengan RAN-PG Indonesia, antara lain:

1. Pokja Ketersediaan

Pokja ini memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah. Pokja ini beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang:

- a. kesehatan;
- b. pertanian;
- c. ketahanan pangan;
- d. kelautan dan perikanan;
- e. sosial;
- f. perindustrian dan usaha kecil menengah;
- g. pengawasan bahan obat dan makanan;
- h. pemberdayaan masyarakat desa;
- i. kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
- j. pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

Koordinator pokja ini disarankan dari instansi yang membidangi pertanian.

2. Pokja Keterjangkauan

Pokja ini memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan. Pokja ini beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang:

- a. pertanian;
- b. ketahanan pangan;
- c. kelautan dan perikanan;
- d. kependudukan dan keluarga berencana;
- e. sosial;
- f. penanggulangan bencana;
- g. perdagangan;
- h. Bulog;
- i. perhubungan; dan
- j. pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

Koordinator pokja ini disarankan dari instansi yang membidangi ketahanan pangan.

3. Pokja Pemanfaatan

Pokja ini memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi. Pokja ini beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang:

- a. kesehatan;
- b. pertanian;
- c. ketahanan pangan;
- d. kelautan dan perikanan;
- e. komunikasi dan informasi;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. Bulog;
- i. pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- j. pendidikan;
- k. agama; dan
- l. pengawasan obat dan makanan.

Koordinator pokja ini disarankan dari instansi yang membidangi kesehatan.

4. Pokja Kelembagaan

Pokja ini memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi. Pokja ini beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang:

- a. perencanaan dan pembangunan daerah;
- b. pertanian;
- c. statistika;
- d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pemberdayaan masyarakat kelurahan; dan
- g. sekretariat daerah (biro kesra, biro ekonomi).

Koordinator pokja ini disarankan dari instansi yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

RAD-PG Kota Madiun juga merupakan salah satu instrumen panduan konvergensi program untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Madiun 2019-2024 yakni *“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”*, sedangkan misinya adalah (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*); (2) Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan; (3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun; (4) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun. Visi dan Misi Kota Madiun diupayakan dengan menjalankan Pancakarya, yaitu Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, dan Madiun Kota Terbuka.

RAD-PG dalam pembangunan berkelanjutan berperan secara khusus dalam meningkatkan potensi yang dimiliki Kota Madiun, yaitu dalam konvergensi program penanganan masalah pangan dan gizi masyarakat. Dokumen RAD-PG Kota Madiun dilengkapi tidak hanya program dan kegiatan penanganan pangan dan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan informasi dukungan penganggaran kegiatan pembangunan pangan dan gizi yang ditunjang baik oleh dana APBN maupun APBD.

3.3 Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Kota Madiun

5.1.1 Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Kota Madiun

1. Kebijakan Terkait Konsumsi

Kebijakan daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun yang terkait dengan konsumsi pangan dan gizi memiliki tujuan:

- a. memberikan perlindungan secara hukum bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya;
- b. memberikan perlindungan secara hukum bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan

- c. meningkatkan peran serta dan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah terhadap pelayanan IMD dan ASI eksklusif.

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kota Madiun dalam rangka IMD dan ASI eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pelayanan IMD dan pemberian ASI eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pelayanan IMD dan pemberian ASI eksklusif;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat fasilitas umum lainnya;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pelayanan IMD dan pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat fasilitas umum, dan kegiatan di masyarakat;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pelayanan IMD dan pemberian ASI eksklusif guna mendukung perumusan kebijakan;
- g. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi pelayanan IMD dan pemberian ASI eksklusif.

Diharapkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola tempat-tempat umum, dan instansi pemerintah atau swasta wajib menyediakan ruang ASI guna mendukung keberhasilan program ASI eksklusif. Selain itu seluruh tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang untuk:

- a. memberikan susu formula bayi yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif;
- b. menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif;
- c. menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi; dan
- d. menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.

2. Kebijakan Terkait Akses

Kebijakan daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun yang mendukung kelancaran akses terhadap pangan dan gizi meliputi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun, yaitu:

- a. hak dan kewajiban keluarga miskin dan penduduk miskin;

- b. pendataan dan penetapan keluarga dan penduduk miskin; dan
- c. arah kebijakan, strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Hak yang terkait dengan pemenuhan pangan dan gizi penduduk miskin yaitu setiap keluarga miskin dan penduduk miskin berhak terpenuhinya kebutuhan antara lain:

- a. pangan;
- b. sandang;
- c. perumahan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. kebutuhan air bersih; dan
- f. sanitasi yang sehat.

Strategi utama percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- a. meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. memperbaiki program perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan
- d. menciptakan pembangunan inklusif.

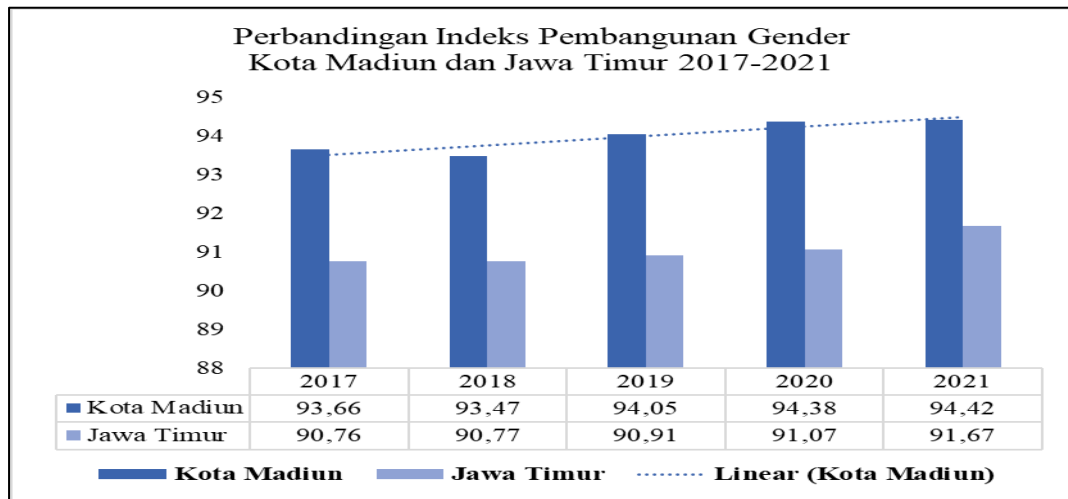
Adapun program percepatan penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum; dan
- h. pelayanan sosial.

5.1.2 Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG di Kota Madiun

Indek Pembangunan Gender (IPG) menjadi salah satu komponen dalam penghitungan IPM. Metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan IPG sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender tercapai pada saat nilai IPG sama dengan IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Pengarusutamaan gender dalam RAD-PG Kota Madiun menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kebijakan, program, dan aktivitas terkait pangan dan gizi. Pendekatan ini mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran, tanggung jawab, kedudukan, dan kebutuhan yang berbeda dalam masyarakat, yang harus diperhatikan berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas dalam kepercayaan, norma, kebiasaan masyarakat, dan adat istiadat untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan Gambar 26 dapat dilihat bahwa IPG di Kota Madiun tidak menunjukkan bias gender, karena capaian IPG relatif tinggi (94,42) yang lebih tinggi dari rerata Provinsi Jawa Timur (91,67).



Gambar 26. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur
Sumber: BPS (2022)

BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

4.1 Strategi dan Aksi

Organisasi kesehatan dunia atau WHO dan Organisasi Pangan Dunia atau FAO merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan, yaitu:

- 1) sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi;
- 2) integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial;
- 3) jaminan sosial dan pendidikan gizi;
- 4) investasi untuk perbaikan gizi;
- 5) lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran; serta
- 6) penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, disusun tujuan strategis dan aksi di bidang pangan dan gizi sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Strategi dan Aksi Pelaksanaan RAD-PG di Kota Madiun

NO.	STRATEGI	AKSI
Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam menyesuaikan dengan potensi wilayah perkotaan Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal setiap kecamatan Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat Memberdayakan peran perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan

NO.	STRATEGI	AKSI
		<p>Menguatkan kapasitas Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan</p> <p>Penguatan kapasitas industri olahan pangan skala kecil dalam rangka penjaminan keamanan pangan dan peningkatan kandungan gizi produk pangan olahan</p>
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	<p>Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di Kota Madiun</p> <p>Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan di setiap kelurahan</p>
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>Food Loss</i>)	<p>Mengembangkan pertanian kota (<i>urban farming</i>) untuk memanfaatkan ruang perkotaan</p> <p>Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, produsen ikan dan peternak terkait</p> <p>Melakukan pendampingan pemanfaatan limbah olahan makanan</p> <p>Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendaiakan kehilangan pangan</p>
1.5	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan
Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
2.1	Peningkatan pasokan dan harga pangan	<p>Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system</i> tetap aktif terpantau dan dilaporkan</p> <p>Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan mencakup pangan komoditas unggulan daerah dan pangan lokal</p>
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan	<p>Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan</p> <p>Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan</p>
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait	<p>Membina UMKM dan koperasi pertanian dalam pengembangan usaha untuk mendukung ketahanan pangan melalui rantai pasok untuk menghindari kelangkaan pangan</p> <p>Meningkatkan peran serta BUMD dalam penguatan pangan dan gizi masyarakat</p>
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam	Mengembangkan mekanisme penanganan pangan masyarakat rentan, yaitu penduduk miskin, ibu hamil menyusui, dan Balita

NO.	STRATEGI	AKSI
		<p>Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik</p> <p>Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)</p>
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat	Revitalisasi/mengaktifkan program cadangan pangan pemerintah daerah bekerjasama dengan <i>supplier</i> bahan pangan lokal di daerah masing-masing
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	<p>Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan dan pencegahan <i>stunting</i></p> <p>Mendampingi daerah rentan pangan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi</p>
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)		
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi dalam rangka penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi di daerah beserta pemanfaatannya
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman sejak usia dini	<p>Meningkatkan kegiatan advokasi <u>penganekaragaman konsumsipangan</u></p> <p>Melakukan kerjasama dengan <i>influencer</i>, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku</p> <p>Melakukan pengutamaan kampanye gerakan makan ikan (gemar ikan)</p> <p>Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang ke dalam kurikulum pendidikan</p> <p>Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik</p>

NO.	STRATEGI	AKSI
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi tenaga pendamping di kelurahan
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang B2SA sejak usia dini	<p>Fasilitasi pembinaan dan komunikasi, informasi dan edukasi pola konsumsi pangan</p> <p>Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini</p> <p>Melakukan <i>orientasi agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular</p>
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan	<p>Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan nilai gizi dalam label kemasan pada UMKM pangan olahan</p> <p>Meningkatkan sosialisasi keamanan dan mutu pangan jajanan anak sekolah</p>
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak Balita dan kelompok rentan rawan pangan	Perluasan cakupan kelompok sasaran siklus hidup dan rentan pangan yang terpenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral
3.6	Pemberian air susu ibu eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan makanan pendamping air susu ibu berbasis pangan lokal	<p>Cakupan pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi usia 6 bulan di Kota Madiun</p> <p>Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal</p>
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	<p>Mendorong untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, tablet tambah darah, dan kapsul vitamin A) untuk mencapai cakupan target sasaran diharapkan</p> <p>Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat</p> <p>Meningkatkan kapasitas Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu penyakit tidak menular</p>
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	<p>Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i></p> <p>Meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup sehat masyarakat</p>

NO.	STRATEGI	AKSI
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak
3.9	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) terkini yang berlaku
3.10	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan	Mendorong peningkatan produk pangan segar dan pangan olahan bersertifikat
Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi		
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i>
4.2	Penguatan peran sektor non pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di daerah Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> .
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran kelembagaan pangandan gizi	Melakukan peningkatan peran kelompok wanita (PKK, kelompok keagamaan, dan lainnya) terkait pangan dan gizi di masyarakat Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan air susu ibu eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan

NO.	STRATEGI	AKSI
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, <i>acceptibilitas</i> , harga, <i>shelf live</i>) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi
4.5	Pengembangan <i>platform</i> penelitian dan pengembangan bidang pangan dan gizi	<p>Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i> atau <i>urban farming</i></p> <p>Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro</p> <p>Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan</p> <p>Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga</p> <p>Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan beragam, bergizi, seimbang, aman yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah <i>stunting</i> yang sudah beredar</p>

4.2 Pengorganisasian

4.2.1 Kerangka Kelembagaan

RAD-PG Kota Madiun didasarkan pada pendekatan multi sektor yang melibatkan sektor kesehatan dan non kesehatan baik dari pemerintah maupun *stakeholder* non pemerintah. Intervensi yang bersinergi dalam satu misi pembangunan dan pengembangan pangan dan gizi di Kota Madiun diharapkan mampu meningkatkan kinerja program masing-masing Perangkat Daerah. Adapun peran Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya yang terlibat dalam RAD-PG Kota Madiun dirinci dalam Tabel 6.

Tabel 6. Lembaga dan Perannya dalam RAD-PG di Kota Madiun

LEMBAGA	PERAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penguatan tenaga kesehatan dan kader Posyandu terkait 1.000 HPK, tumbuh kembang anak, inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, serta status gizi pra hamil dan masa hamil Melakukan promosi, kampanye, dan edukasi terkait 1.000 HPK, pemberian ASI eksklusif, pedoman gizi seimbang, <i>parenting</i>, dan pemantauan berat badan anak Edukasi gizi dalam pemeriksaan <i>Ante Natal Care</i>

LEMBAGA	PERAN
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penyebaran media komunikasi, informasi dan edukasi gizi ke fasilitas kesehatan dan sekolah 5. Melakukan pengawasan dan pengawalan pemasaran susu formula 6. Melakukan intensifikasi penggunaan informasi yang terdapat pada kartu menuju sehat 7. Menetapkan standarisasi pengetahuan gizi bagi tenaga kesehatan 8. Melakukan suplementasi tablet <i>multi micronutrient supplement</i> bagi ibu hamil dan remaja putri 9. Melakukan suplementasi vitamin A pada anak 10. Melakukan pemantauan perkembangan anak melalui penimbangan di Posyandu dan pengisian kartu kontrol 11. Melakukan penatalaksanaan kasus gizi buruk 12. Meninjau dan meningkatkan cakupan peserta Jaringan Keamanan Nasional Kesehatan 13. Meningkatkan kinerja program sanitasi total berbasis masyarakat 14. Melakukan edukasi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat 15. Meninjau jumlah dan distribusi tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar minimal 16. Menjalankan program wajib imunisasi lengkap bagi bayi dan anak 17. Meningkatkan kondisi dan kualitas sanitasi 18. Fortifikasi garam beryodium 19. Melakukan pemberian makanan tambahan pada ibu kurang energi kalori 20. Melakukan surveilans dan skrining gizi masyarakat terutama bayi dan anak 21. Melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga berencana, kualitas hidup, dan perlindungan Perempuan 22. Memfasilitasi pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah 23. Melakukan pembinaan Bina Keluarga Balita dan anak <i>stunting</i>
Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan program Usaha Kesehatan Sekolah untuk mengedukasi pentingnya kesehatan pada anak 2. Melakukan edukasi dan promosi terkait jajanan sehat 3. Melakukan pembenahan kantin sekolah dan peraturan terkait jajanan di sekolah 4. Menggalakkan wajib belajar 12 tahun 5. Mengadakan pelatihan gizi dan tumbuh kembang anak bagi guru 6. Menjalankan program kecakapan hidup perempuan dan keayahanbundaan 7. Memberikan penguatan dan standarisasi pada guru pendamping bagi anak TK 8. Memberikan bantuan perlengkapan edukatif bagi anak TK terkait sosialisasi pangan dan gizi

LEMBAGA	PERAN
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ketahanan pangan rumah tangga melalui Pekarangan Pangan Lestari 2. Melakukan penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi 3. Melakukan pemantauan distribusi, harga, dan cadangan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 4. Melakukan edukasi terkait diversifikasi pangan 5. Upaya peningkatan ketersediaan pangan sumber karbohidrat dan protein 6. Meningkatkan upaya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian di wilayah perkotaan 7. Melakukan sosialisasi penerapan budidaya pertanian yang baik dan ramah lingkungan sesuai dengan lingkungan perkotaan 8. Menerapkan upaya peningkatan kualitas dan nilai tambah hasil produksi pertanian 9. Melakukan penanganan pemasaran hasil pertanian 10. Melakukan pembinaan kelompok afinitas 11. Melakukan promosi dan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi aneka ragam pangan (diversifikasi konsumsi pangan) 12. Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan hasil pertanian lokal 13. Mengembangkan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal 14. Meningkatkan upaya peningkatan budidaya ikan di wilayah perkotaan 15. Melakukan pengembangan agribisnis pertanian, peternakan dan perikanan
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya yang dapat mendukung industri pangan dan rumah tangga 2. Melakukan pembinaan dan pengembangan industri makanan dan minuman 3. Melaksanakan program peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan dan kerajinan (Program Wirausaha Baru) 4. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat 5. Meningkatkan akses teknologi tepat guna 6. Melakukan pengembangan produk unggulan daerah 7. Meningkatkan teknologi, pemasaran, dan akses teknologi tepat guna
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya penanganan masyarakat miskin 2. mengadakan program perlindungan dan jaminan sosial 3. peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial 4. peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga 5. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat

LEMBAGA	PERAN
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Meninjau dan mendukung pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 7. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 8. Memfasilitasi penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga 9. Melakukan pendampingan pemberdayaan pengembangan ekonomi lokal 10. Melakukan pembinaan keluarga sejahtera
<p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembangunan infrastruktur pemukiman yang sehat 2. Melakukan koordinasi dan perencanaan pembangunan rumah tidak layak huni 3. Melakukan penyehatan lingkungan pemukiman 4. Menangani kawasan kumuh perkotaan
<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan dan pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi 2. Melakukan pembinaan kelompok masyarakat pengelola sistem penyediaan air minum 3. Melakukan pembangunan tangka septik skala individual dan MCK 4. Melakukan pembangunan saluran penyediaan air minum ke rumah tangga
<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi dari Perangkat Daerah terkait pangan dan gizi 2. Melakukan penyebarluasan informasi berkaitan dengan pangan dan gizi masyarakat
<p>Dinas Perdagangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja pasar yang terkait dengan penguatan distribusi pangan 2. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan 3. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat 4. Pelaksanaan operasi pasar reguler 5. Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri 6. Pengembangan sistem informasi perdagangan
<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan sampah di masyarakat baik dari sisi pemerintah maupun peran serta masyarakat 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup
<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana 2. Sosialisasi dan diseminasi informasi kebencanaan secara berkala 3. Meningkatkan jumlah kelurahan tanggap bencana
<p>Kementerian Agama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan keluarga 2. Sosialisasi perkawinan pra nikah bagi calon pengantin dan remaja usia sekolah

LEMBAGA	PERAN
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan koordinasi dan advokasi berjenjang 2. Mempublikasikan dan menyebarluaskan kebijakan kepada pengambil kebijakan 3. Melakukan koordinasi rutin Gernas 1.000 HPK 4. Melakukan perbaruan penyusunan regulasi terkait 1.000 HPK terutama pada kelompok rentan 5. Memonitoring implementasi RAD-PG
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung program pemerintah melalui pendudukan dana dan asistensi teknis 2. Melakukan sinergitas agenda perbaikan gizi di tingkat provinsi, nasional, dan global

4.2.2 Instansi Pelaksana

Implementasi RAD-PG di Kota Madiun secara umum akan dilaksanakan oleh dinas/lembaga terkait, namun akan tetap terbuka pada dinas/lembaga di luar yang dicantumkan di dalam dokumen ini. berdasarkan pedoman penyusunan RAD-PG, yang kemudian dibentuk Tim Pelaksana. Tim Pelaksana RAD-PG di Kota Madiun terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini.

Tim Pelaksana RAD-PG di Kota Madiun

Tim Pengarah

- | | |
|----------------------|--|
| I. Pelindung | Wali Kota Madiun |
| II. Pembina | Sekretaris Daerah |
| III. Penanggungjawab | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| IV. Ketua | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| V. Sekretaris | Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| VI. Anggota | |
| VII. Tim Teknis | |

- a. Koordinator
- b. Wakil Koordiantor
- c. Sekretaris

VIII. Pokja-Pokja

- a. Pokja Peningkatan 1.
Ketersediaan 2.
Pangan yang 3.dst
Beragam, Bergizi
Seimbang dan
Aman

- b. Pokja
Keterjangkauan

1.
2.
3.dst

- c. Pokja Pemanfaatan
Pangan dan
Pelayanan Gizi

1.
2.
3.dst

- d. Pokja Kelembagaan 1.
2.
3.dst

4.3 Peran Sektor Non Pemerintah

Implementasi RAD-PG di Kota Madiun tidak hanya melibatkan sektor pemerintah, namun juga sektor pemerintah seperti perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa, swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat madani lainnya. Sinergisme peran sektor pemerintah maupun non pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi RAG-PG yang efektif dan efisien. Sehingga tujuan dan target RAD-PG dapat dicapai dan dinilai indikator keberhasilannya.

4.4 Pembiayaan

RAD-PG di Kota Madiun merupakan perencanaan sistematis dalam mencapai target-target pembangunan bidang pangan dan gizi yang dijabarkan secara kuantitatif dari tahun 2024-2029. RAD-PG ini selanjutnya akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada, baik jangka menengah yaitu RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maupun jangka pendek/tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun anggaran sampai dengan tahun 2029. Pelaksanaan RAD-PG Kota Madiun ini secara sinergis memerlukan dukungan pendanaan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun, dan juga partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Pemantauan dan Evaluasi

5.1.1 Mekanisme Pemantauan

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam satu periode tertentu ditetapkan.

Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah:

1. menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. melakukan pemantauan;
5. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal;
7. menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi; dan
8. menyiapkan laporan hasil evaluasi.

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan pada masing-masing Perangkat Daerah atas cakupan indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/*mid term* dan akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap *intermediate outcome* (indikator pembangunan bidang pangan) dan *outcome* (indikator pembangunan bidang gizi).

5.1.2 Indikator-Indikator yang Dipantau

RAD-PG di Kota Madiun memiliki berbagai program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya tujuan dan target RAD-PG. Kegiatan-kegiatan tersebut dipantau implementasinya agar sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang dipantau dalam implementasi RAD-PG dirinci dalam Tabel 8.

Tabel 8. Indikator RAD-PG di Kota Madiun yang Dipantau Berdasarkan pada Acuan RAN-PG

KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA
1. Indikator Proses - Aspek Kesehatan dan non Kesehatan		
Peningkatan kesehatan bayi dan Balita	Proporsi makanan yang memenuhi syarat keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan (memenuhi persyaratan kemananan, mutu dan gizi)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah • Dinas Perdagangan • Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Tim terpadu pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan • Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Tingkat keamanan pangan (%)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penciptaan nilai tambah dan pengembangan bisnis pangan	Jumlah industri rumah tangga pangan yang dibina dalam produksi makanan sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase produk makanan olahan industri rumah tangga pangan yang dinilai memenuhi syarat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase rumah tangga yang telah menerapkan erilaku hidup bersih dan sehat dan sanitasi total berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penguatan Kelembagaan pangan dan gizi	Frekuensi pertemuan Tim RAD-PG daerah dalam setahun yang dihadiri Wali Kota	Bappeda Kota Madiun
	Jumlah koordinasi lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan Bappeda	Bappeda Kota Madiun
	Jumlah keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam penanganan masalah pangan dan gizi	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kota Madiun • Perangkat Daerah Tim RAD-PG

KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA
2. Indikator Output - Aspek Gizi dan Kesehatan, serta Ketersediaan dan Akses Pangan		
Perbaikan aspek gizi dan kesehatan masyarakat	Proporsi makanan yang memenuhi syarat keamanan pangan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prevalensi Balita <i>stunting</i>	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prevalensi Balita <i>wasting</i>	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Air susu ibu eksklusif untuk bayi 0-6 bulan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka kematian bayi (/1.000 kelahiran hidup)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka Kematian Ibu (1/100.000 kelahiran hidup)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap (usia 12-23 bulan)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka kecukupan energi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Angka kecukupan protein	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Ketersediaan energi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Ketersediaan protein	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Perbaikan aspek pangan baik ketersediaan dan akses	Ketersediaan produksi pangan utama (beras)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Jumlah kelurahan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Skor pola pangan harapan ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Skor pola pangan harapan konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Tingkat keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Jumlah industri rumah tangga pangan yang dibina dalam memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase produk makanan olahan industri rumah tangga pangan yang dinilai memenuhi syarat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5.1.3 Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan

Waktu pemantauan implementasi RAD-PG di Kota Madiun dilakukan tiga kali dalam satu tahun, yakni di awal, pertengahan, dan akhir pelaksanaan program. Pemantauan dilakukan melalui koordinasi yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun. Adapun mekanisme pemantauan dalam satu tahun sebagai berikut:

1. Pemantauan awal implementasi RAD-PG, melalui:
 - a. konfirmasi kondisi yang tertulis di dalam dokumen RAD-PG dengan kondisi nyata di lapang;
 - b. menentukan indikator kinerja implementasi RAD-PG;
 - c. koordinasi dan penyusunan solusi terkait strategi untuk mencapai tujuan, capaian keberhasilan, dan potensi kendala; dan
 - d. sosialisasi kepada *stakeholders* terkait mengenai mekanisme implementasi RAD-PG Kota Madiun.
2. Pemantauan pertengahan implementasi RAD-PG, melalui:
 - a. menganalisa dampak langsung dari pertengahan implementasi RAD-PG terhadap SKPD dan *stakeholders* terkait;
 - b. menganalisa kesesuaian implementasi RAD-PG dengan tujuan dan arah pengembangan RAD-PG; dan
 - c. menggali kemungkinan hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai.
3. Pemantauan akhir implementasi RAD-PG, melalui:
 - a. melakukan monitoring implementasi RAD-PG secara keseluruhan;
 - b. koordinasi capaian keberhasilan dari masing-masing Perangkat Daerah dan *stakeholders* terkait secara keseluruhan; dan
 - c. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan tindak selanjutnya.

5.2 Evaluasi

5.2.1 Indikator-Indikator yang Dievaluasi

Indikator yang dievaluasi merupakan indikator capaian RAD-PG Kota Madiun. Indikator tersebut didasarkan atas lima pilar RAN-PG. Adapun indikator yang dievaluasi adalah sebagai berikut ini.

1. Peningkatan Gizi Masyarakat, meliputi:
 - a. jumlah balita ditimbang (D/S);
 - b. prevalensi balita gizi kurang (BB/U);
 - c. prevalensi balita gizi buruk;
 - d. prevalensi balita *stunting* (TB/U);
 - e. prevalensi balita kurus;
 - f. balita dengan berat badan lahir rendah;
 - g. angka kematian bayi;

- h. angka kelahiran hidup;
 - i. angka kematian ibu;
 - j. prevalensi pemberian air susu ibu eksklusif; dan
 - k. prevalensi anemia dan ibu hamil.
2. Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam, meliputi:
- a. ketersediaan energy;
 - b. ketersediaan protein;
 - c. ketersediaan beras terhadap konsumsi;
 - d. angka kecukupan energi;
 - e. angka kecukupan protein;
 - f. pola pangan harapan;
 - g. jumlah kelurahan rawan pangan; dan
 - h. jumlah masyarakat rawan pangan.
3. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi:
- a. persentase tingkat keamanan pangan;
 - b. proporsi makanan yang memenuhi syarat keamanan pangan;
 - c. jumlah industri pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan pangan; dan
 - d. tim terpadu pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan.
4. Peningkatan lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat, meliputi:
- a. persentase rumah tangga yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat;
 - b. persentase kelurahan dengan pengolahan sampah yang baik; dan
 - c. persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik.
5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi
- a. jumlah Perangkat Daerah di Kota Madiun yang aktif;
 - b. frekuensi pertemuan Tim RAD-PG daerah dalam setahun yang dihadiri Wali Kota; dan
 - c. jumlah koordinasi lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

5.2.2 Waktu dan Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap satu tahun sekali pada akhir implementasi program. Evaluasi dilakukan melalui koordinasi masing-masing Perangkat Daerah dan *stakeholders* terkait yang difasilitasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun. Koordinasi pelaksanaan evaluasi didasarkan atas indikator target capaian RAD-PG Kota Madiun, sehingga keberhasilan capaian target dapat dinilai.

5.2.3 Pelaporan Hasil Evaluasi

Pelaporan hasil evaluasi dari implementasi program ditujukan untuk:

1. menganalisis dampak langsung dari implementasi RAD-PG secara keseluruhan melalui masing-masing Perangkat Daerah dan *stakeholders* terkait;
2. menggali informasi terkait indikator pencapaian, kendala, dan solusinya melalui masing-masing Perangkat Daerah dan *stakeholders* terkait; dan
3. menganalisis keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

5.3 Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur. Selanjutnya Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG Provinsi termasuk Kabupaten/Kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun. Tujuan pelaporan dokumen RAD-PG ke pusat diantaranya:

1. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
2. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
3. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya; dan
4. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

Pelaporan hasil pemantauan dilakukan secara periodik setiap tahunnya. Pelaporan hasil pemantauan akan disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan *stakeholders* terkait yang bersangkutan dengan pembangunan pangan dan gizi. Adapun tujuan dari dilakukannya pelaporan sebagai berikut:

1. memberikan informasi terkait implementai RAD-PG di Kota Madiun; dan
2. memberikan informasi mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi RAD-PG di Kota Madiun.

Mekanisme pelaporan diawali dengan pelaporan yang dilakukan oleh Kota Madiun ke Provinsi Jawa Timur. Kemudian Provinsi Jawa Timur memberikan laporan implementasi RAD-PG yang telah diperoleh ke pusat. Adapun sistematika isi laporan yang dikirimkan mencakup komponen sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

2. Tujuan
- B. Pelaksanaan RAD-PG
 1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
 2. Gambaran Umum Program, Kegiatan, dan Pendanaan
- C. Tantangan yang Dihadapi
- D. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
 1. Bidang Pangan
 2. Bidang Kesehatan
- E. Daftar Pustaka
- F. Lampiran
 1. Form A Pemantauan dan Evaluasi: Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Pelaporan
 2. Form B Pemantauan Proses Pelaksanaan RAD-PG Tahun Pelaporan
 3. Form C Pemantauan Umpan Balik Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Tahun Pelaporan

BAB VI PENUTUP

RAD-PG Kota Madiun merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kota Madiun dalam rangka sinergi program pangan dan gizi dengan Provinsi (Bappeda Kota Madiun, 2020) dan mendukung pembangunan nasional terutama di bidang pangan dan gizi (Bappenas, 2021). Pembangunan pangan dan gizi tidak hanya menjadi target nasional, akan tetapi juga linier dengan upaya SDGs dalam mengurangi isu kelaparan.

RAD-PG Kota Madiun merupakan bentuk perencanaan yang sistematis dalam mencapai target pembangunan pangan dan gizi dengan penjabaran secara kuantitatif dan terukur. Dokumen RAD-PG Kota Madiun disusun dengan mengimplementasikan pendekatan multi sektor yang didasarkan atas pilar atau aspek dalam RAN-PG. Implementasi RAD-PG Kota Madiun memerlukan dukungan pendanaan dari sumber dana APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, serta alokasi APBD Kota Madiun.

Dokumen RAD-PG Kota Madiun dapat dijadikan dasar oleh pemerintah daerah dalam memantau perkembangan implementasi kebijakan pangan dan gizi di Kota Madiun. Kemudian pemerintah juga dapat mengevaluasi hambatan dan tantangan dalam pembangunan pangan dan gizi di Kota Madiun. Adapun tingkat keberhasilan implementasi RAD-PG Kota Madiun sangat bergantung pada sinergi dan partisipasi berbagai *stakeholders*, baik di tingkat Perangkat Daerah hingga DPRD, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha terkait, serta masyarakat.

Dokumen ini disusun dengan kontribusi berbagai *stakeholders* daerah terkait. Oleh karenanya, dokumen ini sangat terbuka terhadap masukan-masukan perbaikan ke depan dalam rangka pembangunan pangan dan gizi di Kota Madiun. Dengan demikian, upaya dalam perbaikan pangan dan gizi dapat selalu diupayakan dengan kinerja yang lebih baik. Adapun program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung RAD-PG di Kota Madiun sesuai dengan tujuan strategisnya dapat dilihat pada Tabel 9 sampai dengan Tabel 12.

Tabel 9. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung RAD-PG di Kota Madiun terhadap Tujuan Strategis 1 Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Akses Pangan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	3	3	3	3	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	DKPP
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	1	1	1	-	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	DKPP
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	4	4	4	4	-	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	-	DKPP
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen	1	1	1	1	-	-	38.000.000	38.000.000	38.000.000	-	-	DKPP
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	3	3	3	3	-	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	DKPP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	-	1	1	1	-	-	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	-	DKPP
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1	1	1	1	-	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	-	DKPP

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
	Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	1	1	1	1	-	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-	-	DKPP
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	-	-	61.000.000	61.000.000	61.000.000	-	-	DKPP
Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	1	1	1	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	DKPP
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	4	4	4	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	DKPP
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	100	120	120	120	-	-	155.500.000	155.500.000	155.500.000	-	-	DKPP
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan/ Usaha Perikanan Tangkap yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan	Pendidikan dan Pelatihan/ Penyuluhan dan Pendampingan Kemitraan Usaha/ Kemu-dahan Akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelembagaan	435	435	435	435	-	-	41.000.000	41.000.000	41.000.000	-	-	DKPP

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengolah dan Pemasaran Ikan yang Dibina	Orang	50	50	50	50	-	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	DKPP
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	12	14	14	14	14	-	-	266.000.000	266.000.000	266.000.000	-	-	DKPP
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	1	1	-	-	26.000.000	26.000.000	26.000.000	-	-	DKPP
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	1	1	-	-	1.906.634.000	1.906.634.000	1.906.634.000	-	-	DKPP
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan Tanaman Skala Kecil	Laporan	12	12	12	12	-	-	70.440.000	70.440.000	70.440.000	-	-	DKPP

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Pengembangan Prasarana Pertanian	%	75	100	100	100	-	-	320.000.000	320.000.000	320.000.000	-	-	DKPP
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana Pertanian yang Terbangun/ Rehabilitasi/ Dipelihara	%	25	25	25	25	-	-	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	-	-	DKPP
Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	4	4	4	4	-	-	155.000.000	155.000.000	155.000.000	-	-	DKPP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	1	1	1	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	DKPP
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	10	10	10	10	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	DKPP
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	10	10	10	10	-	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-	DKPP

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Hektar	50	50	50	50	-	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	DKPP
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan Otoritas Kompeten	Jenis	2	2	2	2	-	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-	-	DKPP
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	39	39	39	39	-	-	158.000.000	158.000.000	158.000.000	-	-	DKPP
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit Usaha	2	2	2	2	-	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	DKPP

Tabel 10. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung RAD-PG di Kota Madiun terhadap Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Pemberdayaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	214	214	214	214	-	-	259.149.660	259.149.660	259.149.660	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	3	3	3	-	-	102.931.180	102.931.180	102.931.180	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5	5	5	5	-	-	344.996.080	344.996.080	344.996.080	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	14	14	14	14	-	-	4.105.839.342	4.105.839.342	4.105.839.342	-	-	DINSOS, PP dan PA

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	165	170	170	170	-	-	293.233332.852	293.233332.852	293.233332.852	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	62	65	65	65	-	-	79.972.145	79.972.145	79.972.145	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	270	280	280	280	-	-	1.401.295.980	1.401.295.980	1.401.295.980	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	70	70	70	-	-	348.179.307	348.179.307	348.179.307	-	-	DINSOS, PP dan PA

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	35	35	35	-	-	277.811.210	277.811.210	277.811.210	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	260	260	260	-	-	147.645.740	147.645.740	147.645.740	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	110	110	110	-	-	68.093.119	68.093.119	68.093.119	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	80	80	80	-	-	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	140	140	140	-	-	130.637.650	130.637.650	130.637.650	-	-	DINSOS, PP dan PA

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	15	-	-	4.356.000	4.356.000	4.356.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Rujukan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	8	8	8	-	-	4.936.800	4.936.800	4.936.800	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	8	8	8	-	-	242.000	242.000	242.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	-	24.685	24.685	24.685	-	-	1.439.920.700	1.439.920.700	1.439.920.700	-	-	DINSOS, PPPA
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	996.184.000	996.184.000	996.184.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	10.667.295.000	10.667.295.000	10.667.295.000	-	-	DINSOS, PP dan PA

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	56	56	56	56	-	-	193.014.740	193.014.740	193.014.740	-	-	DINSOS, PP dan PA
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	300	300	300	-	-	52.266.828	52.266.828	52.266.828	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	15	-	-	56.775.200	56.775.200	56.775.200	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	1	1	1	-	-	161.029.200	161.029.200	161.029.200	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pembinaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	30	30	-	-	659.217.978	659.217.978	659.217.978	-	-	DINSOS, PP dan PA

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG-GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase Rekomendasi Perizinan yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	-	-	155.000.000	155.000.000	155.000.000	-	-	Dinas Perdagangan
Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3	3	3	3	-	-	1.783.000.000	1.783.000.000	1.783.000.000	-	-	Dinas Perdagangan
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	17	17	17	17	-	-	1.473.000.000	1.473.000.000	1.473.000.000	-	-	Dinas Perdagangan
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2	2	2	2	-	-	932.000.000	932.000.000	932.000.000	-	-	Dinas Perdagangan
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	4	4	4	4	-	-	3.882.000.000	3.882.000.000	3.882.000.000	-	-	Dinas Perdagangan
Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	3	3	3	3	-	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-	Dinas Perdagangan

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG-GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	2	2	2	2	-	-	17.993.000	17.993.000	17.993.000	-	-	Dinas Perdagangan
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	4	4	4	4	-	-	566.000.000	566.000.000	566.000.000	-	-	Dinas Perdagangan
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	2	2	2	2	-	-	210.300.000	210.300.000	210.300.000	-	-	Dinas Perdagangan
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan yang Mengikuti Uji Kompetensi	Orang	150	45	45	45	-	-	1.190.000.000	1.190.000.000	1.190.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	Orang	180	60	60	60	-	-	975.000.000	975.000.000	975.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Pembinaan	27	4	4	4	-	-	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pengukuran Produktivitas Perusahaan	Perusahaan	1	10	10	10	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Kualitas Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dibina	Koperasi	300	141	141	141	-	-	773.058.000	773.058.000	773.058.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Koperasi yang Unit Usahanya Bertambah	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dibina	Koperasi	130	141	141	141	-	-	170.000.000	170.000.000	170.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Kualitas Promosi UMKM	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Dibina dan Dipromosikan	Orang	60	150	150	150	-	-	715.000.000	715.000.000	715.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Persetujuan Proses Perijinan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Mengikuti Sosialisasi Standarisasi	IKM	1	20	20	20	-	-	140.000.000	140.000.000	140.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	IKM	1	65	65	65	-	-	364.000.000	364.000.000	364.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Peserta Bimbingan Teknik dan Pengembangan Sarana Standar Pengawasan Mutu Diversifikasi Produk	Kegiatan/ IKM	2	3/60	3/60	3/60	-	-	111.000.000	111.000.000	111.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Publikasi Produk IKM	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Publikasi Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berbasis SIINas	Publikasi	2	5	5	5	-	-	610.000.000	610.000.000	610.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 11. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung RAD-PG di Kota Madiun terhadap Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Unit	1	1	1	1	-	-	271.291.988	271.291.988	271.291.988	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	778	180	180	180	-	-	2.400.268.707	2.400.268.707	2.400.268.707	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>	Unit	619	420	420	420	-	-	112.533.003	112.533.003	112.533.003	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	6	20	20	20	-	-	2.476.985.076	2.476.985.076	2.476.985.076	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	162	162	162	162	-	-	95.683.720	95.683.720	95.683.720	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2450	2450	2450	2450	-	-	362.032.146	362.032.146	362.032.146	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2338	2338	2338	2338	-	-	62.594.797	62.594.797	62.594.797	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2227	2227	2227	2227	-	-	24.008.167	24.008.167	24.008.167	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9081	9081	9081	9081	-	-	216.826.795	216.826.795	216.826.795	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	31582	31855	31855	31855	-	-	28.537.149	28.537.149	28.537.149	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	114664	169969	169969	169969	-	-	554.012.059	554.012.059	554.012.059	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30573	169968	169968	169968	-	-	55.796.020	55.796.020	55.796.020	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	69278	68973	68973	68973	-	-	10.054.149	10.054.149	10.054.149	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7741	8143	8143	8143	-	-	30.787.318	30.787.318	30.787.318	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	339	338	338	338	-	-	182.438.942	182.438.942	182.438.942	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5076	5044	5044	5044	-	-	244.661.575	244.661.575	244.661.575	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5828	5780	5780	5780	-	-	347.229.387	347.229.387	347.229.387	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	2	2	2	-	-	17.879.242	17.879.242	17.879.242	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	3	3	3	-	-	91.263.286	91.263.286	91.263.286	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	3	5	5	5	-	-	586.809.824	586.809.824	586.809.824	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	3	1	1	1	-	-	140.335.852	140.335.852	140.335.852	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	339	338	338	338	-	-	172.832.227	172.832.227	172.832.227	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	1	1	1	-	-	226.567.926	226.567.926	226.567.926	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	36	36	36	36	-	-	42.534.768.390	42.534.768.390	42.534.768.390	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Dokumen	9	10	10	10	-	-	165.266.153	165.266.153	165.266.153	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	7	7	7	7	-	-	2.948.079.130	2.948.079.130	2.948.079.130	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	6	6	6	6	-	-	519.096.248	519.096.248	519.096.248	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	Unit	1	1	1	1	-	-	866.870.726	866.870.726	866.870.726	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	500	200	200	200	-	-	180.290.937	180.290.937	180.290.937	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Peningkatan responsivitas pelayanan kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Dokumen	2	1	1	1	-	-	207.996.871	207.996.871	207.996.871	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum	Dokumen	3	3	3	3	-	-	32.363.815	32.363.815	32.363.815	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	-	-	376.176.044	376.176.044	376.176.044	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Bimbingan Teknis dan Supervisi dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Dokumen	3	1	1	1	-	-	815.718.584	815.718.584	815.718.584	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Peningkatan Pengendalian Jumlah Penduduk di Kota Madiun	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	7	7	7	7	-	-	22.937.931	22.937.931	22.937.931	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	27	27	27	27	-	-	684.232.993	684.232.993	684.232.993	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG-GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
	Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Organisasi	27	27	27	27	-	-	5.995.990	5.995.990	5.995.990	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Promosi dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	2	2	2	2	-	-	82.500.000	82.500.000	82.500.000	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Laporan	12	12	12	12	-	-	51.480.000	51.480.000	51.480.000	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	72	12	12	12	-	-	233.661.103	233.661.103	233.661.103	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengendalian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Laporan	2	2	2	2	-	-	44.000.000	44.000.000	44.000.000	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Orang	150	150	150	150	-	-	137.492.640	137.492.640	137.492.640	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	22	27	27	27	-	-	54.918.549	54.918.549	54.918.549	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Orang	651	661	661	661	-	-	1.274.664.985	1.274.664.985	1.274.664.985	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	2	2	2	2	-	-	963.611.226	963.611.226	963.611.226	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	4	4	4	-	-	15.180.000	15.180.000	15.180.000	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	7	7	7	7	-	-	161.375.621	161.375.621	161.375.621	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
Peningkatan Kepesertaan Anggota Tribina Pasangan Usia Subur yang ber-KB	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Kesehatan Sosial, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Kesehatan Sosial, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Orang	210	230	230	230	-	-	79.991.383	79.991.383	79.991.383	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Kesehatan Sosial, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Kesehatan Sosial, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Laporan	32	12	12	12	-	-	728.181.444	728.181.444	728.181.444	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Kesehatan Sosial, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Kesehatan Sosial, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Orang	225	225	225	225	-	-	463.914.000	463.914.000	463.914.000	-	-	Dinas Kesehatan, PP dan KB

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG-GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
Peningkatan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Manguharjo	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Dokumen	1	1	1	1	-	-	544.243.822	544.243.822	544.243.822	-	-	Puskesmas Manguharjo
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Manguharjo	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	3	3	3	-	-	282.252.445	282.252.445	282.252.445	-	-	Puskesmas Manguharjo
	Operasional Pelayanan Puskesmas Manguharjo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	4	-	-	3.039.049.896	3.039.049.896	3.039.049.896	-	-	Puskesmas Manguharjo
Peningkatan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional Puskesmas Ngegong	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	1	1	1	-	-	540.857.429	540.857.429	540.857.429	-	-	Puskesmas Ngegong
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Ngegong	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	3	3	3	-	-	225.260.897	225.260.897	225.260.897	-	-	Puskesmas Ngegong
	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngegong	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4	4	4	4	-	-	2.503.992.408	2.503.992.408	2.503.992.408	-	-	Puskesmas Ngegong

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	1	1	1	-	-	578.232.936	578.232.936	578.232.936	-	-	Puskesmas Sukosari
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Sukosari	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	3	3	3	-	-	299.067.710	299.067.710	299.067.710	-	-	Puskesmas Sukosari
	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukosari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	4	-	-	2.980.086.135	2.980.086.135	2.980.086.135	-	-	Puskesmas Sukosari
Peningkatan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	1	1	1	-	-	598.660.566	598.660.566	598.660.566	-	-	Puskesmas Tawangrejo
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Tawangrejo	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	3	3	3	-	-	264.668.028	264.668.028	264.668.028	-	-	Puskesmas Tawangrejo
	Operasional Pelayanan Puskesmas Tawangrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	4	-	-	3.558.837.851	3.558.837.851	3.558.837.851	-	-	Puskesmas Tawangrejo

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Banjarejo	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	1	1	1	-	-	615.992.489	615.992.489	615.992.489	-	-	Puskesmas Banjarejo
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Banjarejo	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	3	3	3	-	-	367.299.494	367.299.494	367.299.494	-	-	Puskesmas Banjarejo
	Operasional Pelayanan Puskesmas Banjarejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	4	-	-	3.558.837.851	3.558.837.851	3.558.837.851	-	-	Puskesmas Banjarejo
Peningkatan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	paket	1	1	1	1	-	-	567.581.500	567.581.500	567.581.500	-	-	Puskesmas Demangan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Demangan	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	3	3	3	-	-	345.853.400	345.853.400	345.853.400	-	-	Puskesmas Demangan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Demangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	4	-	-	2.875.781.503	2.875.781.503	2.875.781.503	-	-	Puskesmas Demangan

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1	2	2	2	-	-	973.210.500	973.210.500	973.210.500	-	-	RSUD Kota Madiun
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	2	2	2	-	-	37.952.713.700	37.952.713.700	37.952.713.700	-	-	RSUD Kota Madiun
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	182	30	30	30	-	-	2.126.872.147	2.126.872.147	2.126.872.147	-	-	RSUD Kota Madiun
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD)	Unit	57	15	15	15	-	-	16.354.244.724	16.354.244.724	16.354.244.724	-	-	RSUD Kota Madiun
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (RSUD)	Paket	6	6	6	6	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	RSUD Kota Madiun
Peningkatan Lingkungan Permukiman yang Sehat	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Dokumen	1	1	1	1	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Lokasi	3	1	1	1	-	-	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	%	100	100	100	100	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	1	1	-	-	220.000.000	220.000.000	220.000.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	1	3	3	3	-	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	170	160	160	160	-	-	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Di pugar	Hektar	16,43	16,41	16,41	16,41	-	-	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Ulititas Rumah	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	3	3	3	3	-	-	28.000.000.000	28.000.000.000	28.000.000.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	-	-	123.019.490	123.019.490	123.019.490	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhab	Unit	2	1	1	1	-	-	278.424.630	278.424.630	278.424.630	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung yang Dibangun	Unit	-	2	2	2	-	-	6.655.000.000	6.655.000.000	6.655.000.000	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi-	Km	0,5	1,5	1,5	1,5	-	-	23.884.456.200	23.884.456.200	23.884.456.200	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase Berfungsinya Mesin Pompa Pengendali Banjir	Unit	1	1	1	1	-	-	550.900.900	550.900.900	550.900.900	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen yang Ditindaklanjuti	Dokumen	20	8	8	8	-	-	1.206.854.000	1.206.854.000	1.206.854.000	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang Dibangun	Meter	100	8	8	8	-	-	46.100.789.460	46.100.789.460	46.100.789.460	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Drainase yang Dipelihara	Meter	100	8	8	8	-	-	6.211.336.560	6.211.336.560	6.211.336.560	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG-GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan/ Usaha yang Dipantau Pencegahan Pencemarannya	Kegiatan	78	79	79	79	-	-	1.328.922.270	1.328.922.270	1.328.922.270	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kali	1	20	20	20	-	-	896.000.000	896.000.000	896.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran	Kegiatan	1	3	3	3	-	-	432.922.270	432.922.270	432.922.270	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	2	2	2	2	-	-	174.845.000	174.845.000	174.845.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan	17	18	18	18	-	-	585.000.000	585.000.000	585.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG-GUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Wajib Usaha/ Kegiatan yang Taat dan Belum Taat Pemenuhan Pelaporan Dokumen Perizinan	Wajib Usaha	4	4	4	4	-	-	393.000.000	393.000.000	393.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Membuat Laporan	Wajib Usaha	15	18	18	18	-	-	192.000.000	192.000.000	192.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Peduli Lingkungan	Orang	15	50	50	50	-	-	110.000.000	110.000.000	110.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan Hidup	Kegiatan	4	4	4	4	-	-	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Dikelola	Ton	43.780	43.790	43.790	43.790	-	-	61.035.000.000	61.035.000.000	61.035.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Tempat/Lokasi Pelaksanaan Pengurangan Sampah yang Ditangani Dinas Lingkungan Hidup	Lokasi	2	2	2	2	-	-	480.000.000	480.000.000	480.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG-GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Volume Sampah yang Masuk TPA	Ton	32280	32280	32280	32280	-	-	7.200.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang Berperan Aktif terhadap Pengelolaan Persampahan	Orang	0	350	350	350	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Jenis Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah	Jenis	3	3	3	3	-	-	53.200.000.000	53.200.000.000	53.200.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pihak Swasta Pengelola Sampah yang Dibina dan Diawasi	Kelompok	45	50	50	50	-	-	155.000.000	155.000.000	155.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Kecamatan dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah (Adipura)	Kecamatan	3	3	3	3	-	-	155.000.000	155.000.000	155.000.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Terwujudnya Kualitas Pendidikan yang Berstandar Mutu dan Berkelanjutan Berbasis Teknologi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	119	119	119	-	-	32.388.500.000	32.388.500.000	32.388.500.000	-	-	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	50	76	76	76	-	-	545.611.500	545.611.500	545.611.500	-	-	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang	Satuan Pendidikan	73	56	56	56	-	-	730.469.000	730.469.000	730.469.000	-	-	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	77	77	77	77	-	-	23.307.439.550	23.307.439.550	23.307.439.550	-	-	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket/ kain seragam	1	1	1	1	-	-	3.384.371.000	3.384.371.000	3.384.371.000	-	-	Dinas Pendidikan
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	23	23	23	23	-	-	239.373.000	239.373.000	239.373.000	-	-	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	105	105	105	105	-	-	723.700.000	723.700.000	723.700.000	-	-	Dinas Pendidikan

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	23	96	96	96	-	-	105.805.000	105.805.000	105.805.000	-	-	Dinas Pendidikan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1000	1000	1000	1000	-	-	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	-	-	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	163	163	163	163	-	-	5.716.014.648	5.716.014.648	5.716.014.648	-	-	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Orang	175	175	175	175	-	-	964.624.000	964.624.000	964.624.000	-	-	Dinas Pendidikan
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8 Standar Pendidikan Pada Kualitas Standard Proses dan Penilaian Pendidikan	%	100	100	100	100	-	-	4.443.648.262	4.443.648.262	4.443.648.262	-	-	Dinas Pendidikan
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Prosentase Sekolah yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	100	100	100	100	-	-	880.555.000	880.555.000	880.555.000	-	-	Dinas Pendidikan

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	6	6	6	6	-	-	1.541.925.000	1.541.925.000	1.541.925.000	-	-	Dinas Pendidikan
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusi-an Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Laporan	2	2	2	2	-	-	908.460.000	908.460.000	908.460.000	-	-	Dinas Pendidikan

Tabel 12. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung RAD-PG di Kota Madiun terhadap Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

STRATEGI	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE-LINE 2023	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG-GUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	8	8	8	8	-	-	100.492.876	100.492.876	100.492.876	-	-	DINSOS, PP dan PA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	580	580	580	580	-	-	104.336.199	104.336.199	104.336.199	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	-	-	299.407.416	299.407.416	299.407.416	-	-	DINSOS, PP dan PA

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	34	34	34	-	-	64.085.912	64.085.912	64.085.912	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	-	-	313.345.087	313.345.087	313.345.087	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	257	257	257	257	-	-	124.367.947	124.367.947	124.367.947	-	-	DINSOS, PP dan PA
Peningkatan Tata Kelola Pengarusutamaan Gender	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	2	2	2	-	-	102.991.292	102.991.292	102.991.292	-	-	DINSOS, PP dan PA

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	-	-	174.763.144	174.763.144	174.763.144	-	-	DINSOS, PP dan PA
Peningkatan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	27	27	27	27	-	-	43.200.000	43.200.000	43.200.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	20	20	20	20	-	-	192.000.000	192.000.000	192.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	12	12	12	12	-	-	34.850.000	34.850.000	34.850.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	-	-	33.500.000	33.500.000	33.500.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
Peningkatan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	-	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	100	-	-	112.000.000	112.000.000	112.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	-	-	180.000.000	180.000.000	180.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	-	-	175.000.000	175.000.000	175.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	-	-	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Peningkatan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	12	12	12	13	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	-	-	52.000.000	52.000.000	52.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	-	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	-	DINSOS, PP dan PA
Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	12	12	12	-	-	2.750.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pegelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	12	12	12	-	-	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	12	12	12	-	-	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika

STRATEGI	AKSI/ KEGIATAN	KELUARAN AKSI/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (INDIKATIF)					OPD PENANG- GUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	12	12	12	12	-	-	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	-	30	30	30	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	12	12	12	12	-	-	450.000.000	450.000.000	450.000.000	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

MAIDI



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009